



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 40
MASA SIDANG III
TAHUN 2019

TENTANG

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RAPERDA APBD KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2020

DEMAK, 15 NOVEMBER 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 40 (empat puluh)
Masa Sidang : III
Tahun : 2019
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Senin / 15 November
Waktu : Pukul 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
 Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
- Pimpinan Rapat : Zayinul Fata, S.E
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi :
1. Drs. Djoko Santoso
 (Wakil Bupati Demak)
2. H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
 (Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK
 TERHADAP RAPERDA KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020
- Pembawa Acara : Yulfani Silva Rizqianti, S.Pd.
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
33 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. dr. Singgih Setiono, MMR.
 (Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
2. Staf Ahli Bupati Demak
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
FORKOIMDA KABUPATEN DEMAK
1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
1. Ahmad Nur Wahyudi, SH, MH
 (Plt. Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP, MM
 (Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-40
MASA SIDANG III (TIGA) TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**AGENDA ACARA PANDANGAN UMUM FRAKSI-
FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP
PERDA APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN
ANGGARAN 2020**

Demak, Jumat 15 November 2019

BUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT:

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Warohmatullaahi Wabarokatuh.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Sdr. Sekretaris Daerah, Plt. Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten

Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat Paripurna hari ini perkenankan Kami untuk mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal afiat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin Ya Robbal Alamiin...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1 c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan: ***“Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota DPRD...”***

Kami informasikan bahwa berdasarkan daftar hadir anggota yang telah hadir sebanyak 15 orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiim rapat Paripurna ke-40 tahun sidang III (tiga) tahun 2019 dengan agenda ***Rapat Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020*** Pada hari ini Jumat,

tanggal 15 November 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 telah diserahkan oleh Saudara Bupati Demak pada Rapat Paripurna ke-39 tanggal 11 November 2019. Selanjutnya Raperda tersebut telah dibahas dalam Rapat Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Demak.

Selanjutnya dalam rapat paripurna ini akan disampaikan pandangan umum masing-masing fraksi yang perlu mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Saudara Bupati Demak terkait hasil pembahasan terhadap RAPBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

Untuk itu kesempatan **Pertama** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi **PDI Perjuangan** untuk

menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI P (.....):

Membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan (terlampir).

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan **Kedua** kepada Juru Bicara Fraksi **PKB** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PKB (.....):

Membacakan Pandangan Umum Fraksi PKB (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi PKB yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya pada Kesempatan **Ketiga** kepada Juru Bicara Fraksi **Gerindra** untuk

menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA (.....):

Membacakan Pandangan umum Fraksi GERINDRA. (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra atas penyampaian Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan **Keempat** kepada Juru Bicara Fraksi **GOLKAR** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR (.....):

Membacakan Pandangan Umum Fraksi GOLKAR. (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi GOLKAR atas penyampaian Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan **Kelima** kepada Juru Bicara Fraksi **NASDEM** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM
(.....):

Membacakan Pandangan Umum Fraksi NASDEM (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi **NASDEM** atas Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan **Keenam** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi **PPP** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PPP (.....):

Membacakan Pandangan Umum Fraksi PPP (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi **PPP** atas penyampaian Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan yang **Ketujuh** Juru Bicara Fraksi **Amanat Demokrasi** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI AMANAT
DEMOKRASI (.....):

Membacakan Pandangan Umum Fraksi Amanat Demokrasi (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi **Amanat Demokrasi** yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Demikianlah tadi ketujuh Fraksi DPRD Kabupaten Demak telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya yang berupa pendapat, saran, masukan serta pertanyaan yang perlu mendapatkan penjelasan, semoga menjadi sumbang-saran dan pemikiran yang bermanfaat guna bahan kajian oleh Pemerintah Kabupaten Demak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

ri Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

Untuk itu DPRD mengharapkan kepada Yth. Bupati Demak untuk dapat memberikan sambutan dan tanggapan atas Pandangan umum Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna hari ini. Sesuai dengan jadwal yang direncanakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak, Rapat Paripurna dengan acara sambutan Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 yang Insya Allah dilaksanakan pada hari Senin 18 November 2019. Untuk itu dimohon kehadirannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,
Demikianlah tadi rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang hadir dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD pada

hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya Rapat Paripurna.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamiin Rapat Paripurna ke-40 Masa Sidang III (tiga) Tahun 2019 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, kami nyatakan ditutup.

..... **Dok....dok.....dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwami thariq.

Wassalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokatuh.

Demak, Jumat 15 November 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
 PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019**

HARI : JUMAT
 TANGGAL : 15 NOVEMBER 2019
 PUKUL : 13.30 WIB S/D SELESAI
 TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
 ACARA : RAPAT PARIPURNA PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK
 TERHADAP RAPERDA KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020.

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN		
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB		
3	MASKURI, S.Ag.	GERINDRA		
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR		
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN		
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN		
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN		
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN		
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN		
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN		
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN		
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN		
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN		
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN		
15	EDI SAYUDI	PKB		
16	SUKARMIN	PKB		
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB		
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB		
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB		
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB		
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB		
22	NUR SUSAKTIYO	PKB		
23	MUTHI KHOLIL, SH.	GERINDRA		
24	MUNTOHAR	GERINDRA		
25	MARWAN.	GERINDRA		

27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27	
28	JAYADI	GERINDRA	28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29	
30	HERMIN.WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR	30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR	32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR	34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM	36	
37	MARTONO	NASDEM	37	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM	38	
39	SULKAN	NASDEM	39	
40	GUNAWAN	NASDEM	40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP	42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43	
44	RUMAIN	PPP	44	
45	ABU SAID	PPP	45	
46	SUBARI.	PPP	46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI	48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI	50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT

Demak, 14 November 2019

Nomor : 005/0942
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth. :

1. Komandan Kodim 0716 Demak;
 2. Kapolres Demak;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak;
 4. Ketua Pengadilan Negeri Demak;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
- Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 15 November 2019
Pukul : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
Pakaian : TNI – POLRI : P.D.H
P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Demak (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak;
3. Arsip.

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;

b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Rapat Fraksi-fraksi membahas : Selasa s/d
Raperda APBD Kabupaten Demak Kamis
Tahun Anggaran 2020. 12 s/d 14
November
2019
2. Rapat Paripurna Pandangan : Jumat
Umum Fraksi-fraksi terhadap 15 November
Raperda APBD Kabupaten Demak 2019
Tahun Anggaran 2020. (Pukul 13.00)
3. Rapat Paripurna Jawaban Bupati : Senin
atas Pemandangan Umum 18 November
Fraksi-fraksi terhadap Raperda 2019
APBD Kabupaten Demak Tahun (Pukul 09.00)
Anggaran 2020.
4. Rapat Badan Anggaran DPRD : Selasa
Kab. Demak dalam rangka 19 November
membahas Raperda tentang 2019
APBD Kab. Demak Tahun (Pagi s/d
Anggaran 2020. Malam)

Demak Tahun Anggaran 2020.

November

2019.

(Pagi s/d

Malam)

6. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD : Jumat
bersama Ketua - ketua Fraksi, 22 November
Pimpinan Bapemperda, Pimpinan 2019
Badan Kehormatan dan Pimpinan
Komisi A, B, C, dan D membahas
Raperda tentang APBD Kab.
Demak Tahun Anggaran 2020.
7. Rapat Paripurna Persetujuan : Senin
DPRD terhadap Raperda tentang 25 November
APBD Kab. Demak Tahun 2019
Anggaran 2020.
8. Evaluasi Gubernur atas Raperda : Selasa s/d
APBD Kab. Demak Tahun Jumat
Anggaran 2020. 26 s/d 29
November
2019
9. Rapat Penyelarasan Pimpinan : Jum'at
Badan Anggaran DPRD Kab. 29 November
Demak bersama TAPD Kab. 2019
Demak terkait hasil Evaluasi
Gubernur atas Raperda APBD
Kab. Demak Tahun Anggaran
2020.

KEDUA : Kajian atau telaah Bapemperda terhadap Raperda Inisiatif tanggal 15 s/d 17 November dan 22 s/d 24 November 2019

KETIGA : Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak tanggal 26 s/d 29 November 2019

KEEMPAT : Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Demak tanggal 30 November s/d 1 Desember dan 7 s/d 8 Desember 2019

dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan
Kabupaten Demak

KEENAM : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

KETUJUH : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 11 November 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Merdeka !!!

Yang kami hormati. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Yang terhormat Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD
Kabupaten Demak;

Yth. Sdr. Unsur FORKOMPINDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan;

Yth. Sdr. Asisten Sekda, Kepala Bagian, OPD / Instansi di lingkungan
pemerintah Kabupaten Demak;

Yth. Sdr. Camat Se-Kabupaten Demak;

Dan tamu Undangan serta Teman-teman Wartawan.

Hadirin Peserta Rapat yang kami hormati;

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh saudara Bupati Demak pada tanggal 11 November 2019.

Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allah humasholli'ala Muhammad wa'alaalisyaidina Muhammad*. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat-Nya .*Amien* Yaa Robal'alam.

Sebelum Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 perkenankan kami mengucapkan :

1. Selamat Hari Pahlawan 10 November 2019, Bung Karno berkata "JAS MERAH" ***Jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah.*** Bangsa yang besar adalah, bangsa tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menghargai jasa pahlawannya. Adapun cara terbaik berterima kasih pada pahlawan adalah meneruskan perjuangan mereka dengan menjaga keutuhan NKRI dan menjadi Pahlawan Masa Kini. . Hari ini tugas kita adalah menjadi pahlawan selanjutnya, dengan terus mnggelorakan semangat kepahlawanan, perjuangan, keikhlasan, mengisi kemerdekaan yang benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan Negara.
2. Kami ucapkan Selamat Hari Ayah, 12 November 2019, Hari ayah adalah hari untuk menghormati ayah. Ayah merupakan sosok orang tua yang keberadaannya tidak kalah penting dengan seorang ibu. Meskipun seorang ayah tidak pernah melahirkan atau menyusui anak-anaknya tetapi berkat perjuangan dan kerja kerasnya dalam menghidupi keluarga merupakan suatu pengabdian yang sangat luar biasa yang harus kita hargai. Selama ini ayah selalu bertanggung jawab akan keperluan anak-anak dan keluarganya. Ia tidak pernah menghiraukan dirinya sendiri, rasa lelah tidak ia rasakan, terik matahari ia lawan dan deras hujan ia halau demi untuk mencari nafkah bagi keluarga dan anak-anak yang dicintainya.
3. Selamat Hari Kesehatan Nasional, 12 November 2019, ***Mens sana in corpore sano***, (Di dalam Tubuh Yang Sehat Terdapat Jiwa Yang Kuat). Menjaga kesehatan adalah suatu faktor yang sangat berharga didalam hidup. Tubuh yang sehat sanggup meringankan kita dalam melakukan bermacam – macam pekerjaan dan kesibukan tanpa kendala. Karena dengan mempunyai Raga yang bugar, tentu saja akan menghasilkan jiwa yang damai dan perasaan yang seimbang. Memperhatikan

terasa Indah jika dibarengi dengan fisik dan jiwa yang sehat. Maka Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan Program Stunting. Selanjutnya *Mari kita jadikan Hari Kesehatan Nasional sebagai momentum untuk menyadari betapa pentingnya kesehatan dalam kehidupan kita. Ayo hidup sehat mulai dari diri kita !*

4. Selamat Hari Brimob (Brigade Mobil), 14 November 2019, semangatmu yang tak pernah pudar, untuk membela negeri ini, berbahakti kepada ibu pertiwi, kau adalah pahlawan negeriku.
5. Selamat Hari Anak-anak Sedunia, 20 November 2019, Semoga dapat menjadi inspirasi bagi orang tua untuk memberikan hak serta pendidikan terbaik untuk anak. "Mari kita jadikan rumah dan lingkungan kita ramah anak. Agar mereka nyaman dan aman dalam masa pertumbuhannya

Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;

Sebelumnya, ingin kami sampaikan bahwa kami sangat mengapresiasi upaya eksekutif dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa eksekutif bekerja dengan baik dan ingin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan alur komunikasi dan koordinasi dengan DPRD selaku mitra strategis dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Pada dasarnya Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, sebagai upaya pemerintah daerah untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun 2020. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

Selanjutnya menjadi tugas Fraksi PDI Perjuangan untuk mengamati dan menilai Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, benar-benar memiliki

anggaran. Sesuatu hal yang perlu di cermati adalah adanya perubahan kearah lebih baik dari tahun sebelumnya dengan tujuan utama bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Demak.

Setelah mempelajari dan mencermati, ada beberapa cacatan, kajian dan analisis Fraksi PDI Perjuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. Hal ini kami lakukan sebagai masukan dan pertimbangan demi sasaran yang lebih terarah untuk kemajuan Kabupaten Demak tercinta. Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan sudah seyogyanya memberikan masukan, catatan maupun pertanyaan sebagai berikut :

- 1, Terkait kebijakan perekrutan CPNS agar dapat dilakukan secara profesional dan terbuka, agar mendapat tenaga-tenaga yang berkompeten di bidangnya masing-masing.
- 2, Fraksi PDI Perjuangan mendorong SATPOL PP agar lebih tegas dalam penegakan perda-perda yang ada sesuai perundang-undangan yang berlaku.
3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan sistem online agar terjadi transparansi, akuntabilitas dengan harapan mampu meningkatkan PAD tahun berikutnya.
4. Berbagai program yang telah direncanakan oleh pihak pemerintah agar dilakukan secara cermat, profesional dan lebih mengedepankan hasil.
5. Untuk penataan kawasan kumuh di Kecamatan Sayung butuh anggaran yang sesuai. Harapan penataan kawasan tersebut memiliki nilai dan daya tarik tersendiri sehingga merubah kawasan kumuh menjadi kawasan yang ramah lingkungan dan nyaman bagi penghuninya.
6. Dalam pengelolaan sampah saat ini, masih terlihat belum maksimal, baik dari hulu hingga hilir, Mengingat sampah bisa kita kelola dengan baik mulai dari rumah tangga, pengiriman dan pengolahannya, dengan memilah sampah organik dan anorganik. Sehingga ada sisi ekonomis yang bisa masyarakat rasakan dan terjaga lingkungannya.

menggalisumber PAD guna meningkatkan PAD dan tercapainya target PAD Kabupaten Demak. Selanjutnya untuk menunjang Smart City dan meningkatkan PAD, maka dalam hal optimalisasi pengelolaan Parkir dilakukan dengan **Sistem e-Parking**.

8. Untuk kesinambungan jalannya proses pendidikan yang baik di masyarakat, kami dari Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar segera ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pendidikan. Terkait dengan hasil audensi antara Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi D dan Pimpinan Bapemperda dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Demak.
9. Fraksi PDI Perjuangan mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak supaya segera mendata jumlah GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Kabupaten Demak agar tidak terjadi dobel penganggaran.
10. Untuk program penelusuran bakat dan minat Olah Raga dan untuk menjaring bibit-bibit potensial di semua cabang olah raga harus ada penambahan anggaran. Khusus pada cabang olah raga Sepak Bola disamping ada anggaran khusus dari pemerintah daerah, juga melakukan terobosan dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk mengoptimalkan dana **Corporate Social Responsibility (CSR)**.
11. Untuk peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Demak, diperlukan inovasi, penataan dan pengawasan di Sektor Pariwisata. Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak di sektor Pariwisata perlu adanya terobosan berupa Destinasi Wisata baru pada kawasan Pantai.

Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami sampaikan, dengan harapan mendapat perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amien. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Merdeka !!!

Demak, 14 November 2019

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Ketua



H. Busro,SPd



Sekretaris



Hanna Maharani Layinnatus Syifa SE

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020**



**SIDANG PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
JUM'AT, 15 NOPEMBER 2019**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020**

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua

- Yang Kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak:
- Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua DPRD dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang Kami Hormati Jajaran FORKOPIMDA Kabupaten Demak.
- Yang kami hormati Saudara Sekda, beserta jajarannya;
- Yang Kami Hormati Sekretaris Dewan Kab. Demak.
- Yang kami hormati Rekan-Rekan Wartawan, dan Hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah robbil' alamin segala puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kab Demak pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, Sholawat serta salam semoga selalu tercurah Kepada Nabi agung Muhammad SAW.

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Pimpinan Sidang, yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi Partai

Kebangkitan Bangsa (FPKB), untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD KAB DEMAK Tahun Anggaran 2020, dalam forum yang terhormat ini.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah dalam menjalankan fungsinya baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemda Kab Demak yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya penyusunan APBD pada substansinya adalah untuk melakukan penyesuaian kondisi-kondisi terkini yang ada di tengah masyarakat secara makro maupun mikro, sehingga dengan APBD penggunaan secara tepat dapat memberikan manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya menanggapi penyampaian Penghantar Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh Bupati Kab Demak, maka izinkan kami Fraksi PKB, memberikan pandangan umumnya terkait beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara RAPBD kabupaten Demak tahun anggaran 2020 sebesar **Rp 1.900.552.503.000**
(*satu triliun sembilan ratus milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga ribu rupiah*) pendapatan asli daerah sebesar **RP.403.848.956.000.-**

(empat ratus tiga milyar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) sedangkan dana perimbangan adalah sebesar Rp.997.492.058.000.-*(sembilan ratus sembilan puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta lima puluh delapan ribu rupiah)*sedangkan dana lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar RP.499.211.489.000 *(empat ratus sembilan puluh sembilan milyar dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)* kalau kita lihat dengan cermat adalah , bahwa kontribusi berdasarkan proyeksi yang di sampaikan bupati kabupaten Demak terlihat ada kenaikan PAD sekitar 21.25 % sedangkan secara keseluruhan dana perimbangan memberikan kontribusi sebesar 52 % sedangkan pendapatan lain yang sah memberikan kontribusi sebesar 26%

Dengan adanya selisih tersebut tentunya didukung oleh berbagai argumentasi, namun yang terpenting adalah dalam RAPBD ini, ada dua hal pokok yaitu Pendapatan dan Belanja. Prinsip dasar arus Pendapatan adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas, sehingga pendapatan daerah terkumpul sebanyak-banyaknya. Sementara prinsip dasar arus Belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Kab Demak yang lebih berkeadilan.

2. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah, dalam kerangka ekonomi makro, diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah, yang lebih memberikan effect multiplier, bagi peningkatan kesejahteraan Rakyat yang lebih merata. Dengan kenaikan

PAD tersebut tentunya dalam belanja juga diperhatikan Efektivitas anggaran mengingat tahun 2020 Kabupaten Demak akan melaksanakan Pilkada tentunya akan menelan anggaran yang cukup besar oleh karena itu Dalam rangka melakukan efektivitas anggaran, apabila dana tidak terserap dikarenakan kegiatan tidak terlaksana, Selanjutnya Fraksi PKB meminta agar penyerapan anggaran diharapkan bukan hanya sekadar terserap saja namun juga diharapkan penyerapan memberikan efek positif dalam rangka meningkatkan Pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat.

3. Secara keseluruhan, pendapatan asli daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020 ada kenaikan 7% tetapi berdasarkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Demak sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 kurun waktu 5 tahun pertumbuhan ekonomi kab Demak tertinggi 5,82 % pada tahun 2017 sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 5,37%. Oleh karena itu FRAKSI PKB menekankan kepada bupati serta Jajaran untuk meningkatkan kinerja dan harus mencari terobosan agar kenaikan PAD 7% dapat terealisasi dan tidak membebani pada masyarakat, jika bupati serta jajaran tidak memiliki opsi lain maka dipastikan 7% kenaikan hanya isapan jempol saja. Tuntutan kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 7 % harus mampu di wujudkan karena jika semua ini bisa terealisasi maka secara langsung maupun tidak pertumbuhan ekonomi kabupaten Demak akan terdorong sehingga tingkat Kemiskinan dengan sendirinya akan semakin berkurang namun sebaliknya jika pemerintah tidak bisa mewujudkan maka kemiskinan di kabupaten Demak akan semakin meningkat .

4. Untuk Pendapatan Asli Daerah, Fraksi PKB Mengapresiasi, tetapi di sisi lain

menyoroti kinerja seluruh jajaran eksekutif Pemerintah Kab Demak, khususnya terkait dengan aspek pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat jauh dari harapan karena sesungguhnya potensi untuk menaikkan pendapatan asli daerah masih cukup besar. Sehubungan hal tersebut, Fraksi PKB berharap bahwa OPD yang terkait dengan pendapatan, agar terus menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi), berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik, dan benar, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Perubahan Kebijakan Pendapatan, tentunya berdasarkan kondisi terkini kinerja perekonomian Daerah maupun Nasional, serta memperhatikan perhitungan RAPBD Kab. Demak Tahun Anggaran 2020 khususnya evaluasi kinerja bidang pendapatan, maka kebijakan Pendapatan Daerah pada RAPBD TA 2020 Kab Demak harus mempertimbangkan berbagai hal seperti Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan semester satu tahun 2020, hasil kinerja dari pengelolaan Badan layanan Umum daerah BLUD maupun BUMD, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, juga menjadi bahan pertimbangan. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya apa yang bisa dilakukan pemerintah Kabupaten Demak agar target pendapatan daerah dapat terpenuhi. (wajib di realisasi)

6. Selanjutnya Fraksi PKB memandang bahwa penyampaian tentang Rancangan APBD TA 2020 adalah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pengelola keuangan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, juga sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakan akuntabilitas Publik dalam

semua tahapannya. Oleh karena itu prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi Masyarakat.

7. Untuk mewujudkan visi Kab Demak haruslah di dukung dengan daya saing yang kuat . Oleh karena itu, daya saing menjadi persoalan yang harus kita hadapi dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih siap. Dalam Anggaran RAPBD Tahun Anggaran 2020 ini sangat penting kiranya mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan Ekonomi masyarakat, pembangunan sarana umum yang berbasis teknologi ,Sarana olahraga ,Gedung seni dan budaya, serta pariwisata dan tidak ketinggalan adalah perlunya meningkatkan SDM dan kesejahteraan para Guru Madrasah Diniyah . Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelatihan ketrampilan ekonomi lainnya, pengembangan produk lokal berbasis daerah agar dapat dilaksanakan hingga akhir tahun 2020 mendatang, sehingga kita berharap muncul produk-produk lokal yang dapat dipasarkan ke luar daerah Kab Demak atau bahkan pasar luar negeri. Seberapa besar RAPBD tahun 2020 ini memperhatikan kegiatan dalam rangka meningkatkan daya saing.
8. FRAKSI PKB menyoroti lemahnya para pemangku kepentingan untuk melakukan koordinasi antar Instansi yang terkait dalam menjalankan regulasi yang tepat dan efisien belum mampu di wujudkan dengan baik, dan perlunya pemerintah mengevaluasi beberapa peraturan Bupati yang tidak berpihak kepada masyarakat ekonomi rendah antara lain toko modern menjamur sampai ke desa-desa dan juga ada yang buka 24 jam, inilah pokok pikiran kami agar pemerintah benar-benar mengedepankan Rakyat kecil jangan sampai pembiaran ini berlanjut sehingga tidak menciptakan kemiskinan baru.

pelayanan satu pintu yang di harapkan masyarakat tidak mampu di wujudkan dengan waktu yang efisien, oleh karena itu di mohon pemerintah di tahun 2020 bisa mengubah yang baik lagi agar harapan masyarakat mampu diwujudkan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat kabupaten Demak bisa lebih baik.

9. Pemerintah kabupaten Demak mulai tahun 2020, menuju Demak smart city, kami FRAKSI PKB memberikan apresiasi gagasan serta pemikiran tersebut, tetapi apa yang kita rasakan dan yang kita lihat sampai hari ini rasanya masih jauh dari harapan, oleh karena itu pembenahan layanan fasilitas umum untuk menuju smart city harus lebih di utamakan bukan sebaliknya justru pembangunan perkantoran yang menjadi utama.

10. Perda Pendidikan yang sudah pernah di bahas, tetapi belum ada kesepakatan dalam pengesahannya oleh karena itu, FPKB mendesak agar Perda tentang Pendidikan untuk segera di sahkan.

11. Kehadiran Undang-undang No.18 tahun 2019 tentang pesantren, menjadi konsekuensi logis pemerintah Daerah untuk menerbitkan Perda Pesantren. Untuk itu FPKB mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keberpihakan anggaran Daerah terhadap sektor pendidikan Non Formal (Pesantren, MADIN, TPQ dan lembaga keagamaan lainnya).

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Sebelum menutup Pemandangan Umum ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap agar proses pembahasan RAPERDA RAPBD tahun 2020 ini betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD yang benar-benar memenuhi keinginan

masyarakat Kabupaten Demak.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang ABPD Tahun Anggaran 2020, ada kurang lebihnya dalam penyampaian Pemandangan Umum ini kami mohon maaf, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mohon ijin kami untuk menyampaikan pantun

“(Beban berat coba di angkat, Walau berkeringat di cuaca panas, Mari bersama sama berjuang melestarikan adat agar kita bisa mengayomi masyarakat)”

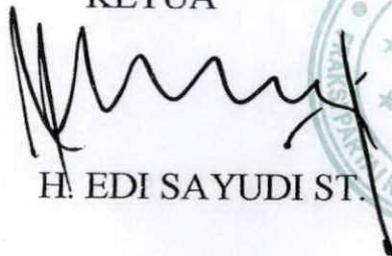
Wallahul muwaafiq ilaa aqwamittoriq.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Demak, 15 Nopember 2019

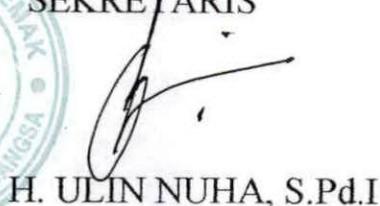
PIMPINAN PRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
KABUPATEN DEMAK

KETUA



H. EDI SAYUDI ST.

SEKRETARIS



H. ULIN NUHA, S.Pd.I





**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)
DPRD KABUPATEN DEMAK**

TERHADAP:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG:

**“ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020”**

Oleh:

DANANG SAPUTRO, S.H.

**Disampaikan dalam Sidang Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak
Jumat, 15 November 2019**

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**TERHADAP:
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG:
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020**

**Disampaikan dalam Sidang Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Demak, Jumat 15 November 2019**

**Oleh :
Danang Saputro, S.H.**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Indonesia Raya!

1. Yang saya hormati Saudara Bupati Kabupaten Demak;
2. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kabupaten Demak;
3. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak;
4. Yang saya hormati FORKOMPINDA Kabupaten Demak;
5. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
6. Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
7. Yang saya hormati Kepala Dinas, Badan, Bagian, Bidang, dan Seluruh Camat;
8. Yang saya hormati Rekan - Rekan Wartawan dan Hadirin sekalian.

kesempatan ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda **“Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020”**.

Selanjutnya, sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada jujungan kita beliau Nabi Muhammad SAW, yang senantiyasa kita nantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Saudara Bupati, Pimpinan, Anggota Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan Pemandangan Umum kami.

Sebelum kami menyampaikan Pemandangan Umum kami, izinkan kami Fraksi Partai Gerindra mengucapkan: **“Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita senantiyasa diberikan hidayah untuk meneladani sifat dan perilaku Rosululloh setiap saat”**. Kami juga mengucapkan, **“Selamat hari Pahlawan, dengan memperingati hari pahlawan diharapkan kita mampu meningkatkan rasa cinta kepada tanah air”**.

berbahagia.

Setelah melakukan rapat Fraksi Partai Gerindra selama tiga hari, kami menyimpulkan pandangan umum kami, yaitu sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Pemerintah Pusat (BKPP) dalam menjalankan seleksi CPNS agar profesional dan terbuka sesuai ketentuan yang berlaku, dan kami berharap Saudara Bupati untuk segera memproses pengangkatan honorer K2 yang sudah lolos seleksi, sebelum proses pelaksanaan CPNS 2019 dilaksanakan.
2. Sejauh mana SATPOL PP melakukan tindakan kongrit terhadap penegakan Perda yang telah ditetapkan bersama DPRD dan Bupati Kabupaten Demak?
3. Terkait dengan pengambil alihan BKK Dempet menjadi BKK Jawa Tengah mengakibatkan Pemda Kabupaten Demak tidak menerima Deviden (bagi hasil) 2020 – 2021. Apa langkah Saudara Bupati untuk menyikapi hal tersebut?
4. Terkait dengan kejadian kekurangan bahan baku sebagaimana yang dikeluhkan oleh direktur PDAM dan dampak dari sobeknya bendung karet, maka langkah antisipasi apa yang dilakukan Saudara Bupati ke depan agar dalam tanda kutip Tragedi tidak terulang?
5. Terkait persoalan pasar yang sangat rumit, mulai dari parkir, retribusi, kebersihan, dan sejenisnya, langkah konkrit apa yang saudara Bupati akan lakukan pada tahun 2020 dan pada masa yang akan datang?

tersebut bisa mencapai angka dua puluh empat milyar. Bagaimana saudara Bupati menyikapinya?

7. Terkait dengan sampah organik dan non organik, kami berpendapat bahwa hal tersebut dapat diolah menjadi pupuk dan berguna bagi masyarakat. Bagaimana Saudara Bupati mewujudkan hal tersebut?
8. Apakah program **PUSKESMAS BLUD** bisa dilaksanakan dengan baik? Mengingat pendapatan di tiap – tiap puskesmas sangat kecil, selama ini masih ditopang APBD yang cukup besar.
9. Dinas Kesehatan segera menemukan data anggota BPJS PBI yang dibekukan oleh pusat sebesar tiga puluh empat ribu jiwa se-Kabupaten Demak, karena menyangkut keterpeliharaan kesehatan masyarakat.
10. Anggaran menu untuk penanganan Stanting sebesar Rp 8000 (delapan ribu rupiah) per-hari untuk satu pasien agar ditingkatkan anggarannya sekurang – kurangnya Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), karena hal tersebut menyangkut **Lose Generation** yang akan datang.
11. Terhadap buku RAPBD dan buku penetapan APBD, untuk mencantumkan program sehingga dapat jelas dibaca dan diketahui oleh masyarakat, termasuk lampiran – lampirannya.

berbahagia.

Setelah kami memaparkan serangkaian Pemandangan Umum, kami juga memberikan beberapa saran dan usulan, yaitu:

1. Melakukan perbaikan kantor – kantor kecamatan yang sudah tidak layak.
2. Sesuai visi dan misi Bupati Kabupaten Demak terkait dengan bidang keolahragaan, kami mengusulkan untuk memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana olahraga secara kongkrit, yaitu segera membangun **Sport Centre** yang memadai.

; Demikian, Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Demak, semoga masukan dan kritikan yang konstruktif yang telah disampaikan bermanfaat untuk membangun Kabupaten Demak yang lebih baik, semoga Allah Swt. selalu menyertai langkah kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan.

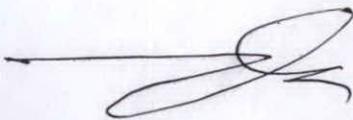
Salam Indonesia Raya!

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Demak, 15 November 2019

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

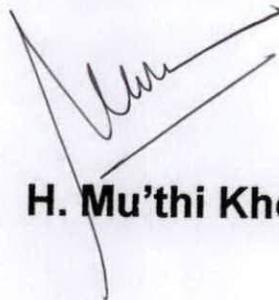
Ketua,



Danang Saputro, S.H.



Sekretaris,



H. Mu'thi Kholil, S.H.



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020**

SIDANG PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK

DEMAK, 15 NOPEMBER 2019

TERHADAP
RAPERDA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yth. Sdr. Wakil Bupati wakil Bupati,

Yth. Sdr. Ketua , Wakil Ketua , dan Seluruh Anggota Dewan,

Yth. FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak,

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan,

Yth. Sdr. Para Asisten dan Staf Ahli Bupati,

Yth. Sdr. Kepala Dinas, Badan,Instansi, Bagian, Sdr. Camat Se Kabupaten Demak, Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia.

Puji syukur kehadiran Allah SWT tentunya senantiasa kita panjatkan karena hanya oleh limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Pemandangan Umum terhadap Raperda tentang APBD kabupaten Demak Tahun 2020

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhamad SAW dengan harapan semoga kita tetap mendapat syafaatnya sampai di hari akhir.

Hadirin yang berbahagia,

Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD kabupaten Demak Tahun 2020. perkenalkan kami menyampaikan ucapan ***Selamat Hari SUMPAH PEMUDA Ke 91, Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa*** demi kejayaan dan berdiri tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.Serta melalui sumpah pemuda kita wujudkan pemuda yang maju,mandiri dan profesional. Demikian pula fraksi Partai Golkar menyampaikan Selamat hari pahlawan 10 November 2019 .”perkokoh persatuan membangun Negeri Jasamu selalu ku kenang perjuanganmu kami lanjutkan”

Sidang paripurna yang berbahagia,

Sebagaimana Nota pengantar Bupati dalam penyerahan Raperda APBD Tahun anggaran 2020 yang telah disampaikan dalam rapat dewan tanggal 11 2019 yang lalu, kami perlu menyampaikan pendapat dan pandangan-pandangan demi penyempurnaan raperda yang dimaksud.”

Sidang Paripurna yang berbahagia,

APBD merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan pelayanan yang paling kongkrit yang menunjukkan prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran. Dari APBD dengan sangat mudah dikenali, apakah pemerintah daerah berorientasi kepada dirinya sendiri (*aparatur birokrasi*) ataukah telah mengarahkan program kebijakan dan anggaran kepada kebutuhan public, berpihak pada kebutuhan masyarakat. Hakikat APBD adalah alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat dalam upaya pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. Atas dasar itulah, sebagaimana ifestasi dari komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka Fraksi Partai Golkar terus mendorong Pemkab Demak untuk dapat memanfaatkan secara optimal atas semua pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas , *yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat, mampu mengurai permasalahan yang dihadapi rakyat, memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yang pada akhirnya bermuara terhadap meningkatnya kesejahteraan rakyat.*

Oleh karena itu, Fraksi Partai Golongan Karya dapatlah memberikan pendapat, tanggapan, saran, dan pertanyaan, sbb.:

1. Fraksi Golkar Memberikan saran Untuk penatausahaan Belanja modal agar pemerintah Daerah mempertimbangkan Tupoksi Sesuai Bidangya di Masing-masing OPD dan mendorong **DINPUTARU DAN DINPERKIM** diperbesar Anggarannya agar target pembanguan Infrastruktur terselesaikan
2. Mohon Penjelasan ! Berdasarkan RPJMD Kabupaten Demak Sektor Pariwisata Merupakan Program proritas Bupati. Fraksi Golkar Melihat ,mencermati kurang di prioritaskan untuk Anggaran Pariwisata. untuk memperkuat agar pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran maksimal.

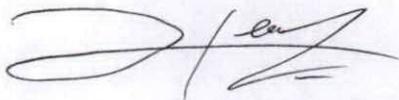
4. Fraksi Partai Golkar mendorong agar Penyediaan SPORT CENTRE agar segera merealisasikan program-program agar segera terwujud.
5. Mohon Penjelasan ! Pendapatan Retribusi Daerah di target dalam RAPBD 2020 Sebesar Rp.23.710.118.375,00 (Dua puluh tiga milyar Tujuh ratus sepuluh juta seratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) hal ini menurun drastis dibandingkan tahun 2019 Sebesar Rp.36.029.429.500,00 (tiga puluh enam milyar dua puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh Sembilan lima ratus rupiah) dan dibawah realisasi APBD Tahun 2018 Sebesar Rp. 24 905.213.499,00 (Dua puluh empat milyar Sembilan ratus lima juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)
6. Fraksi Golkar mendorong Kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Realisasi Pencairan DD (Dana Desa) agar tepat waktu dan sesuai aturan serta tidak memperlambat pencairan di Desa wilayah Kabupaten Demak yang bisa menghambat pembangunan di desa serta pelaporannya.
7. Bahwa pembangunan Infrastruktur diarahkan ke fasilitas umum. Fraksi Golkar Mencermati ada beberapa pembangunan yang kurang berguna untuk kepentingan umum. Untuk itu pemerintah Daerah diharapkan lebih cermat lokasi lokasi pembangunan biar tidak terjadi polemic seperti pembangunan jembatan di Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam.
8. Dalam pembahasan RAPBD Mengharapkan OPD membawa Dokumen RKA agar pembahasan lebih teliti, detail dan tepat sasaran.
9. Mohon Penjelasan ! adanya anggaran TPP ASN yang sangat besar dalam RAPBD TAHUN 2020.
10. Mohon Penjelasan ! Rencana Pengadaan tanah di Dinas Lingkungan Hidup Seluas 7 Ha pada RAPBD 2020 Serta sejauh mana Kajian lingkungan hidup TPA dikecamatan Wedung karena menyangkut nasib produktifitas tambak petani dikecamatan Wedung.
11. Terkait adanya rencana Anggaran Reward pengurus barang dan pengelola di RAPBD Tahun 2020 .Fraksi Golkar mohon penjelasan berkaitan tersebut. target output dan outcome dari kegiatan tersebut.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya terhadap R. R. D. Kabupaten
Demak Tahun 2020 . Kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi
kemajuan Demak tercinta.

Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Demak, 15 Nopember 2019
Fraksi Partai Golongan Karya
DPRD Kab. Demak



Hermin Widyawati, S.Pd

Ketua



Robert Fredy Kurniawan.

Sekretaris

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM (FPND)
DPRD KABUPATEN DEMAK



Partai NasDem

GERAKAN PERUBAHAN

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

DEMAK, 15 NOPEMBER 2019



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM (FPND) DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020**

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak,

Yth. Sdr. Ketua dan Para Wakil Ketua, beserta segenap Anggota Dewan

Yth. Sdr. Forkopimda Kabupaten Demak

Yth. Sdr Sekretaris Daerah dan sekretaris DPRD Demak

Yth. Sdr. Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda Demak

Yth. Sdr. Para Kepala OPD, Badan, Kantor dan Camat se Kab.Demak

Hadirin, reka-rekan wartawan, para tamu undangan, serta Pendengar Radio kota Wali yang berbahagia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak mengajak para Hadirin, pertama dan yang utama untuk mengucapkan Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, karena hanya Dia-lah Dzat yang maha Adil dan Bijaksana, sehingga kehadiran para hadirin pada hari ini dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari serangkaian tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, dalam rangka mengemban amanat rakyat dengan mengharap ridho Allah SWT.

Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepangkuan Nabi Agung Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya sehingga kelak memperoleh syafa'atnya.Amiin ya rabbal alamin.

Selanjutnya Perkenankan kami, Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Pimpinan rapat, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi partai NasDem yang perdana, terhadap nota keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun anggaran 2020.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta rapat Dewan yang kami hormati.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang penjabaran APBD Kabupaten Demak tahun Anggaran 2020 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak pada hari senen tanggal 11 Nopember 2019 walaupun dokumen ditarik kembali baru hari rabu tanggal 13 nopember anggota Dewan mendapat dokumen tersebut. Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi partai NasDem terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 terlebih dahulu ijin fraksi partai NasDem mengucapkan :

PERTAMA : Selamat atas Pengambilan Sumpah jabatan Bpk Ir H. JOKO WIDODO dan Bpk Prof. DR .KH MA'RUF AMIN selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari minggu tanggl 20 Bulan Oktober tahun 2019 hasil pemilu presiden dan wakil presiden pada tanggal 17 april 2019, dan telah terbentuknya Kabinet Indonesia maju.

KEDUA : Selamat kepada bangsa indonesia yang baru saja telah memperingati hari santri nasioanal tanggal 22 oktober 2019, hari sumpah pemuda tanggal 28 oktober 2019 dan hari

KETIGA : Selamat dan sukses serta memberikan apresiasi kepada Kapores Demak beserta jajarannya, Dandim Demak beserta jajarannya, Pemkab Demak, KPUD, Bawasiu Demak yang telah bekerja keras dalam mengantarkan pileg, pilpres 2019 dengan aman, damai sejuk dan tidak ada gangguan yang berarti.

KEEMPAT : Selamat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Demak yang terhormat, atas terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Namun sangat-sangat disayangkan bahwa dalam pembentukan pimpinan alat kelengkapan dewan cacat prosedural, proporsional, dan tidak profesional serta tidak mencerminkan azas kebersamaan, sehingga tidak lazim dan tidak biasanya serta tidak sesuai dengan rumus proporsional yang selama ini digunakan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Demak periode-periode sebelumnya, yang selalu menggunakan rumus sbb :

Jumlah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan ada 16, terdiri dari (ketua, wakil ketua dan sekretaris), dibagi jumlah kursi 50 di DPRD kemudian dikalikan perolehan jumlah kursi tiap-tiap fraksi dan atau gabungan fraksi, untuk lebih jelasnya fraksi Partai NasDem jelaskan sebagai berikut :

Tabel : A.1

NO	FRAKSI	JML KURSI	RUMUS	HASIL	DIBULATKAN DAN SEHARUSNYA	DAPAT
1	PDIP	11	16 : 50 X 11	3,52	4	5
2	PKB	9	16 : 50 X 9	2,88	3	3
3	GERINDRA	8	16 : 50 X 8	2,56	3	3
4	GOLKAR	7	16 : 50 X 7	2,24	2	3
5	NASDEM	6	16 : 50 X 6	1,92	2	0
6	PPP	5	16 : 50 X 5	1,60	1	1
7	GABUNGAN	4	16 : 50 X 4	1,28	1	1
	JUMLAH	50	-	-	16	16

Sesuai dengan rumus proporsional dan profesional serta azas kebersamaan yang selalu digunakan oleh Pimpinan DPRD Demak Periode-periode sebelumnya, sehingga Fraksi PDIP seharusnya mendapat pimpinan 4 (empat) di Alat Kelengkapan Dewan bukan mendapat 5 (lima), begitu juga Fraksi GOLKAR seharusnya mendapat pimpinan 2 (dua) di Alat Kelengkapan Dewan bukan mendapat 3 (tiga). Fraksi Partai NasDem seharusnya mendapat jatah pimpinan 2 (dua) di alat kelengkapan dewan diambil oleh Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar, sehingga Fraksi Partai NasDem sama sekali tidak mendapat pimpinan di alat kelengkapan Dewan (AKD). Ada apa pimpinan DPRD yang terhormat periode sekarang ini?.

Fraksi Partai NasDem menyadari bahwa DPRD adalah lembaga politik yang terdiri dari fraksi-fraksi sebagai pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum 2019, jadi setiap pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan politik semata, namun mempertimbangkan azas kebersamaan, proporsional dan profesional yang lebih diutamakan agar tercipta suasana yang kondusif, sekali lagi DPRD adalah **bukan lembaga menang-menangan**, dan baru periode ini pimpinan dewan, sepanjang sejarah reformasi pembentukan pimpinan Alat Kelengkapan dewan paling buruk, dan tidak mendasar azas proporsional, profesional dan semangat kebersamaan yang selama ini digunakan oleh pimpinan dewan periode-periode sebelumnya. Untuk itu Fraksi Partai NasDem minta pembentukan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) ditata kembali karena cacat azas semangat kebersamaan dan tidak sesuai dengan rumusan yang proporsional dan profesional.

Salah satu prasyarat utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah adalah upaya yang terus menerus untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan, hal ini disebabkan oleh karena keuangan daerah merupakan salah satu alat utama untuk mewujudkan kesejahteraan, dimensi pemikiran tersebut harus menjadi pijakan penting Pemerintah Daerah Demak dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan beserta proyeksi penganggarannya setiap tahunnya

Kebijakan Umum Anggaran (KUA PPAS) yang baik adalah rumusan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat di daerah, terukur, transparan, akuntabel, partisipatif, sustainable dan sinkron dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat, oleh karena itu penyusunan kebijakan anggaran harus memperhatikan ketentuan-ketentuan (regulasi) yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh Pemerintah pusat.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2020 beserta PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) hendaknya banyak mempertimbangkan berbagai permasalahan makro dan mikro ekonomi, sosial dan politik yang berkembang di Masyarakat, sekaligus potensi perekonomian 2020 yang menjadi basis rasionalitas angka-angka nominal APBD 2020. Potensi tersebut baik berupa produktifitas sumber daya manusia, aset dan aspirasi masyarakat, serta kondisi sumberdaya alam di kabupaten Demak.

A. VISI MISI BUPATI DEMAK PERIODE 2016 - 2021

1. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”

2. Misi

- a. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat.
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel
- c. *Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi local serta mengurangi tingkat pengangguran.*
- d. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan perkembangan kota dan desa.
- e. *Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan sesuai standar serta perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.*
- f. Menciptakan keamanan ketertiban dan lingkungan masyarakat yang kondusif.
- g. *Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.*
- h. *Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.*
- i. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Demak, 2. Masih tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Demak, 3. Rendahnya Kesadaran masyarakat untuk pendidikan PAUD 4. Kurangnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ditemukannya kasus kematian ibu, bayi dan balita, 2. Masih ditemukannya gizi buruk, 3. Tingginya usia harapan hidup belum diimbangi dengan penanganan kualitas lansia dengan baik, pemeriksaan usia lanjut mengalami penurunan 4. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, 5. Masih ditemukannya penyakit menular (DBD, HIV AIDS, Filariasis, TB, Kusta) dan Penyakit tidak menular cenderung mengalami peningkatan. 6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum seluruh jaringan irigasi dan drainase dalam kondisi baik. 2. Rasio lahan terbuka hijau untuk publik belum sesuai dengan ketentuan. 3. <i>Belum semua rumah tangga mampu mengakses air bersih, hal ini dapat dilihat proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak</i> 4. Belum seluruh rumah tangga memiliki sanitasi sehat (pengelolaan air limbah). 5. Pengelolaan sampah belum optimal hal ini terbukti persentase sampah yang terangkut
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pemukiman kumuh belum optimal (Universal Accses). 2. Belum seluruh rumah tidak layak huni mendapat penanganan menjadi rumah layak huni.
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya kualitas SDM dalam perwujudan ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dari persentase anggota linmas yang terlatih. 2. Rawan gangguan keamanan ketertiban hal ini dikarenakan Kabupaten Demak merupakan wilayah perlintasan dari Jakarta menuju Surabaya. 3. <i>Rawan bencana banjir, rob, abrasi dan kekeringan.</i> 4. Kabupaten Demak merupakan daerah industri yang rawan kebakaran. 5. Kurangnya SDM dan sarpras dalam penanganan bencana dan kebakaran.
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama pada fakir miskin dan keluarga rentan, hal ini dapat dilihat keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun, hanya mampu memiliki 1 (satu) stel pakaian lengkap per orang per

	<p>kebutuhan hidup selama 3 (tiga) bulan atau dua kali batas garis sangat miskin.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Belum Seluruh Panti Sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 3. Terbatasnya kualitas PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam penanganan PMKS. 4. <i>Belum optimalnya rehabsos pada disabilitas (penyandang cacat), anak kebutuhan khusus, dan lanjut usia.</i> 5. Masih kurangnya kualitas sarana dan prasarana dalam melakukan Rehabsos di Kabupaten Demak.
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tinggiya angka pengangguran, hal ini dapat dilihat jumlah penganggur terbuka (TPT).</i> 2. <i>Belum optimalnya pelatihan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.</i> 3. <i>Belum optimalnya penempatan tenaga kerja.</i> 4. Belum optimalnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 5. Belum Seluruh perusahaan melakukan perlindungan terhadap tenaga Kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan. 6. Belum optimalnya penanganan permasalahan tenaga kerja migran.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Belum optimalnya peran kelembagaan Pengarus utamaan Gender (PUG.)</i> 2. <i>Masih kurangnya peran lembaga layanan korban kekerasan anak dan perempuan sampai ke tingkat desa/kelurahan.</i> 3. <i>Tingginya kasus kekerasan pada anak dan perempuan.</i> 4. <i>Belum tersedianya data terkait dengan PUG dan PUHA (Pengarustamaan Hak Anak).</i> 5. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Demak belum sesuai harapan.
Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Belum optimalnya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan.</i> 2. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Demak terutama cadangan pangan tingkat desa. 3. Belum optimalnya pengelolaan diversifikasi pangan disebabkan tingginya ketergantungan pada beras (belum beragam), selain itu pola pikir yang berkembang pada masyarakat pangan import lebih baik dari pangan lokal. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Masih belum optimalnya penanganan keamanan pangan baik pangan olahan maupun pangan segar. (masih ditemukannya makanan yang mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan) 5. Belum tercapainya target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat.
Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengawasan terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Demak lemah.

	3. Banyak terjadi pencemaran lingkungan air
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua penduduk memiliki administrasi kependudukan dengan baik, penduduk ber KTP sebesar 89,31%, Bayi Berakte Kelahiran sebesar 87,31%, dan Akte Kematian sebesar 1,23%. 2. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan pembaharuan data kependudukan. 3. Belum tersebarnya sarana dan prasarana pencatatan kependudukan diseluruh kecamatan.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat.</i> 2. Kesiapan pemerintah desa dalam penerapan Undang-Undang tentang desa serta turunan kebawahnya masih belum optimal.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya Kesadaran masyarakat dalam rangka mengendalikan kelahiran dilihat dari tingginya unmetneed (8%),KB Baru (15%), Cakupan KB Pria masih rendah (3%) dan PUS yang ber KB aktif (77%). 2. Masih kurangnya tenaga petugas lapangan KB. 3. Masih kurangnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat dilihat persentase kelurahan/desa yang memiliki BKB (Bina Keluarga Balita) BKL (Bina Keluarga Lansia) BKR (Bina Keluarga Remaja).
Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota. 2. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. 3. Belum optimalnya jaringan trayek dengan jalan. 4. Belum memiliki transportasi massal, Kondisi sarana prasarana perhubungan yang ada
Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Pengelolaan informasi dan komunikasi public Pemerintah. 2. Belum optimalnya Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah.
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pengelolaan Koperasi. Hal ini ditandai dengan rendahnya koperasi aktif dan koperasi sehat. 2. Belum optimalnya Pemberdayaan usaha mikro. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya data usaha mikro. 3. Belum optimalnya pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
Penanaman Modal Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyelenggaraan promosi investasi penanaman modal melalui kerjasama investasi dalam dan luar negeri. 2. Belum sinkronisasinya regulasi antar pusat dan daerah dalam penanaman modal. 3. Masih rendahnya realisasi investasi dibandingkan dengan yang mengajukan permohonan. 4. Belum adanya perda penanaman modal sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2012 tentang pemberian Insentif/Kemudahan penanaman modal yang tersinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan olahraga. Hal ini dapat dilihat dari prestasi olahraga 3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam pengembangan olahraga.
Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah. 2. Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah.

Pimpinan sidang, Saudara Bupati, dan Wakil Bupati, serta Rapat Dewan yang kami Hormati

C. PENCAPAIAN KINERJA EKONOMI DAERAH

Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Demak tidak terlepas dari pertumbuhan perekonomian nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya. Berdasarkan pada rancangan teknokratik tentang rencana jangka menengah nasional 2020 - 2024 dan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, maka pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 diproyeksikan sebesar 5,4 - 5,8 %, dengan asumsi:

1. Perekonomian dunia terus mengalami pemulihan
2. Tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi,
3. Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Tingkat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Demak tahun 2018 sebesar **5,37%**, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,32% dan perekonomian nasional sebesar 5,17%. Oleh karena itu, sesuai dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Demak, maka pada tahun 2020 menargetkan:

1. Pertumbuhan ekonomi: 6,1% - 6,3%.
2. Inflasi : 4% - 5%
3. **Indek Pembangunan Manusia (IPM) : 71,07%**
4. **Jumlah penduduk miskin : 9,6%**
5. **Tingkat pengangguran terbuka : 5,00%.**

Dalam dokumen KUA-PPAS, Laju Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,82% pada tahun 2017 dan menurun menjadi 5,37% pada tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2018 (dalam persen)

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
Kabupaten Demak	4,29	5,93	5,09	5,82	5,37	5,30
Provinsi Jawa Tengah	5,42	5,47	5,25	5,26	5,32	5,34
Nasional	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17	5,03

Sementara itu, laju inflasi dalam dokumen KUA-PPAS tercatat 3,57% pada tahun 2017 dan menurun 2,73% pada tahun 2018.

D. DATA KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak mengalami penurunan dilihat dalam lima tahun terakhir, (2014 – 2018) 12,54% Akan tetapi, pencapaian terbaik ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Jawa Tengah 11,90% dan Nasional 9,82% di tahun yang sama , Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Sumber : Demak Dalam Angka 2018.

Perbandingan tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2014 – 2018.

Tingkat Kemiskinan	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Kab.Demak	%	14,60	14,44	14,40	13,41	12,54
Prov Jateng	%	13,58	13,58	13,27	13,01	11,90
Nasional	%	11,25	11,22	10,86	10,64	9,82

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Demak mengalami tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan kinerja pemerintah kabupaten dalam upaya penurunan kemiskinan.

E. PENGANGGURAN

Secara umum permasalahan yang dihadapi Kabupaten Demak dalam pembangunan ketenagakerjaan yaitu *penanganan pengangguran dan setengah pengangguran di kawasan perdesaan*. Pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang berasal dari usia produktif dan apabila tidak diturunkan akan menimbulkan berbagai penyakit yang berkembang di masyarakat.

Terbukanya lapangan kerja yang luas dan banyak merupakan solusinya.

Catatan :

Dalam Dokumen KUA-PPAS tidak dicantumkan data pengangguran riil dan data target penurunan angka pengangguran.

Catatan :

Data penurunan kemiskinan tahun 2017-2018 tidak dicantumkan dalam dokumen KUA-PPAS. Berdasarkan penelusuran media, meskipun terjadi penurunan kemiskinan dari tahun ke tahun, namun angka kemiskinan Kabupaten Demak pada 2018 masih tercatat 12,54 persen atau masih diatas angka kemiskinan Jawa Tengah yakni 11,9 persen. Oleh karena itu, Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) tahun 2020 fokus pada pengentasan kemiskinan, karena Demak yang berada pada posisi 11 Kabupaten se-Jateng masuk zona merah. Indikasi kemiskinan juga dapat terlihat dari fluktuasi grafik inflasi. Di samping angka harapan hidup, hingga tingkat pengangguran terbuka. Terkait angka pengangguran terbuka, walaupun grafiknya sempat turun dari 2014 (11,84 persen) hingga 2017 (4,47 persen), namun kembali naik drastis pada 2018 menjadi 7,16 persen. Sebagai evaluasi, hal itu terjadi seiring naiknya UMR sementara di sisi lain tidak diimbangi kemampuan perusahaan.

1. Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk memerangi kemiskinan, namun membuat pertumbuhan tersebut berpihak kepada orang miskin, seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat, merupakan hal yang lebih penting lagi, dimana potret menggambarkan tingkat pengangguran Kabupaten Demak cenderung naik .
2. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi pro-rakyat dibutuhkan suatu kebijakan belanja APBD yang efektif dan efisien di dalam mekanisme alokasi dan distribusi yang berkeadilan.
3. Disamping APBD, instrumen kebijakan pro rakyat non-APBD bisa melalui perbaikan iklim investasi, kerjasama Perbankan, Institusi Pembiayaan Swasta dan BUMD perlu untuk diefektifkan.
4. Kontribusi Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sejak 2014-2018 cenderung mengalami penurunan signifikan. Padahal sektor ini pernah menjadi primadona pada tahun 2015 dan cukup banyak menyerap tenaga kerja khususnya masyarakat akar rumput. Perlu ada upaya serius pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor ini. Sebagaimana data tersebut dibawah ini.

Data pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha tahun 2014-2018 persen yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-3,31	5,98	0,94	4,04	0,87
B	Pertambangan dan Penggalian	3,62	2,17	1,11	13,61	9,53
C	Industri Pengolahan	7,69	5,99	8,65	6,71	6,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,93	6,37	5,92	5,65	4,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,30	4,01	3,18	6,37	6,08
F	Konstruksi	5,26	3,45	6,02	4,24	5,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda Motor	3,66	6,02	6,17	6,02	6,44
H	Transportasi dan Pergudangan	7,74	7,81	5,57	5,88	7,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,77	4,40	4,61	4,87	7,43
J	Informasi dan komunikasi	10,99	9,42	9,39	14,88	12,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,29	5,98	7,27	6,10	4,82
L	Riil estate	9,37	6,33	6,70	5,87	6,31
M, N	Jasa Perusahaan	9,72	8,06	8,27	8,10	8,84
O	Administrasi Pemerintahan,	4,12	2,39	2,23	2,08	3,25

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,23	7,33	7,38	8,34	9,01
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,19	4,08	6,83	6,95	7,66
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) %	4,29	5,93	5,09	5,82	5,37

Pimpinan sidang, Saudara Bupati, dan Wakil Bupati, serta Rapat Dewan yang kami Hormati

F. PRIORITAS KEBIJAKAN TAHUN KELIMA

Prioritas pembangunan Kabupaten Demak pada tahun 2020 yaitu :

1. Rehabilitasi jalan Rusak (peningkatan infrastruktur yang mendukung ekonomi daerah)
2. *Penanganan Rumah Tidak Layah Huni*
3. Pembangunan embung di wilayah selatan dan jaringan
4. Pembangunan pasar (rehabilitasi/revitalisasi)
5. *Peningkatan sarana prasarana untuk mendukung produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan menuju kedaulatan pangan*
6. Peningkatan akses air bersih dan akses sanitasi
7. Peningkatan sarana prasarana perhubungan
8. Peningkatan kinerja dan kapasitas aparatur sipil negara
9. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
10. Peningkatan pendampingan bagi usaha kecil
11. Peningkatan kualitas jaringan irigrasi tersier
12. Peningkatan kualitas hasil pertanian dan pendampingan petani
13. Peningkatan kapasitas pelaku perdagangan dalam rangka meningkatkan ekspor
14. Penataan PKL
15. Peningkatan kapasitas petani budidaya
16. Peningkatan kualitas dan keterampilan nelayan budidaya dan tangkap
17. Mengembangkan destinasi pariwisata
18. *Peningkatan kualitas ruang kelas*
19. *Peningkatan sekolah memiliki laboratorium dan perpustakaan*
20. *Pemberian beasiswa melalui beasiswa miskin daerah*
21. Pengadaan sarana prasarana rumah sakit dan operasionalnya
22. Penanganan korban kekerasan perempuan dan anak
23. Peningkatan sistem pelayanan publik yang mudah diakses (pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan)
24. Penyediaan pusat-pusat informasi berbasis IT
25. Pembinaan pemuda dan atlet
26. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

oleh Kabupaten Demak bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Demak,
2. Masih tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Demak, persentase angka putus sekolah untuk SD/MI sebesar 0,08% dan SMP/MTs = 0,17%.
3. Rendahnya Kesadaran masyarakat untuk pendidikan PAUD, menunjukkan bahwa APK PAUD formal sebesar 40,52% dan PAUD non formal sebesar 45,85%.
4. Kurangnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Ruang kelas baik hanya 65,52%

Sementara itu, program prioritas yang berkaitan dengan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas ruang kelas
2. Peningkatan sekolah memiliki laboratorium dan perpustakaan
3. Pemberian beasiswa melalui beasiswa miskin daerah
4. Peningkatan sistem pelayanan publik yang mudah diakses (pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan).

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, telah dijabarkan beberapa program/kegiatan sebagai berikut:

Program	Kegiatan
Program Pendidikan Anak Usian Dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 2. Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usian Dini 3. DAK Bidang Pendidikan – BOP (Bantuan Operasional pendidikan) PAUD 4. DAK Fisik Bidang Pendidikan-Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD
Program Pendidikan Non Formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 2. Penyediaan sarana dan prasarana PNF (DAK Fisik bidang Pendidikan) 3. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF)
Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar jenjang SD 2. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SMP 3. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa jenjang SD/MI 4. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa jenjang SMP/MTS 5. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP 6. DAK bidang pendidikan-pengembangan sarana pendidikan SD dan SMP 7. BOS (Bantuan Operasional Sekolah) jenjang SD 8. BOS (Bantuan Operasional Sekolah) jenjang SMP

	<p>kompetensi</p> <p>3. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>4. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>5. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik</p> <p>6. Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan</p>
Program manajemen pelayanan pendidikan	<p>1. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan</p> <p>2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p>

H. MASALAH KESEHATAN

Berikut ini merupakan isu strategis bidang kesehatan yang dimuat dalam RPJMD Demak Tahun 2016-2021 :

1. Masih ditemukannya kasus kematian ibu, bayi dan balita.
2. Masih ditemukannya gizi buruk.
3. Tingginya usia harapan hidup belum diimbangi dengan penanganan kualitas lansia dengan baik, pemeriksaa usia lanjut mengalami penurunan.
4. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
5. Masih ditemukannya penyakit menular (DBD, HIV AIDS, Filariasis, TB, Kusta) dan Penyakit tidak menular cenderung mengalami peningkatan.
6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Gizi Buruk, Angka Harapan Hidup (AHH)

Dalam dokumen KUA-PPAS belum disebutkan data terkait angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), angka gizi buruk, angka harapan hidup (AHH), namun data tersebut dituangkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021.

I. KEBIJAKAN PENDAPATAN

Target pendapatan daerah Kabupaten Demak tahun 2020 adalah **Rp. 1.900.552.503.000.** (*Satu Triliun Sembilan Ratus Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah*) adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

URAIAN	RAPBD 2020	Proporsi (%)
PAD	Rp. 403.848.956.000	21,2%
Pajak daerah	Rp. 146.235.340.625	36,2%
Retribusi daerah	Rp. 23.710.118.375	5,8%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 18.525.813.000	4,5%
Lain-lain PAD yang sah	Rp. 181.711.299.000	53,3%
Dana Perimbangan	Rp. 997.492.058.000	52,4%
Dana bagi hasil pajak/Bukan pajak	Rp. 37.080.664.000	3,7%
Dana alokasi umum	Rp. 960.411.394.000	96,3%
Dana alokasi khusus	-	-
Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 499.211.489.000	26,2%
Hibah	Rp. 287.089.488.000	57,5%
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	Rp. 148.054.467.000	29,6%
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp. 64.067.534.000	12,8%
Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.900.552.503.000	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan daerah kabupaten demak didapat dari Dana perimbangan yang mencapai Rp. 997.492.058.000. (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*), atau 52,4% dari jumlah pendapatan.

Sementara itu, PAD hanya menyumbang 21,2% atau sekitar Rp. 403.848.956.000. (*Empat Ratus Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*), lain-lain pendapatan yang sah hanya menyumbang 26,2% dari total pendapatan atau sekitar Rp. 499.211.489.000. (*Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*)

Besarnya anggaran yang diperoleh dari Dana Alokasi Umum serta dana penyesuaian dan otonomi khusus yang notabene dari pemerintah pusat dalam menyumbang pendapatan daerah Kabupaten Demak pada tahun 2020 menunjukkan

J. PROPORSI BELANJA LANGSUNG-TIDAK LANGSUNG

Untuk uraian belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

URAIAN	RAPBD 2020	Proporsi (%)
Belanja Langsung	Rp. 779.736.380.805	39,32%
Belanja Pegawai	Rp. 158.693.707.259	20,35%
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 437.186.652.161	56,06%
Belanja Modal	Rp. 183.856.021.385	23,57%
Belanja Tidak Langsung		
belanja Pegawai	Rp. 677.134.838.159	34,15%
Belanja Hibah	Rp. 45.608.199.000	37,91%
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 31.279.800.000	2,60%
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota/Desa	Rp. 19.397.808.000	1,61%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada/Kab/Kota/Desa	Rp. 427.395.477.000	35,53%
Belanja Tidak Terduga	Rp. 2.000.000.000	0,16%
Jumlah	Rp. 1.202.816.122.195	60,68%
Jumlah Belanja	Rp. 1.982.552.503.000	100,00%

Total belanja pegawai Rp. 835.828.545.454. (*Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), atau 42,15 % dari total belanja daerah. Sementara belanja modal hanya sebesar 9,27 % dari total belanja. Padahal belanja modal merupakan belanja yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu.

URAIAN	RAPBD 2020
Penerimaan Pebiayaan Daerah	Rp. 98.000.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA)	Rp. 82.000.000.000
Pencairan Dana Cadangan	-
Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-
penerimaan Pinjaman Daerah	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
Penerimaan Piutang Daerah	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 16.000.000.000
pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daeah	Rp. 16.000.000.000
Pembayaran Pokok Hutang	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-
PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 82.000.000.000

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan Wakil Bupati, peserta rapat yang berbahagia.

Terhadap RAPBD TA 2020, Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak berkesimpulan dan berkewajiban memberikan masukan, saran dan pendapat terhadap penganggaran dan program-program sebagai berikut :

1. *Fraksi Partai Nasdem menilai, belum ada rumusan kebijakan strategis yang konkrit dalam upaya meningkatkan pendapatan. Banyak yang masih terlalu umum dan belum dapat menjamin upaya peningkatan pendapatan daerah utamanya PAD dan harus digaris bawahi "peningkatan PAD tanpa harus menambah beban masyarakat utamanya masyarakat miskin atau masyarakat menengah ke bawah", oleh karena itu perlu diperjelas baik rumusan kebijakan umum maupun kebijakan strategisnya agar lebih konkrit dan realistik. Misalnya : "Peningkatan dan optimalisasi PAD, khususnya pada peningkatan pajak, identifikasi potensi pajak baru dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat utamanya masyarakat miskin dan menengah ke bawah".*
2. *Banyak data-data penting yang tidak tercantum dalam KUA. Misalnya data penduduk miskin, Data penurunan kemiskinan tahun 2017-2018, data tingkat pengangguran terbuka, IPM, IPG, IDG, data pengangguran riil dan data target penurunan angka pengangguran. Tidak adanya data-data persoalan strategis ini menyulitkan dewan terutama fraksi Partai NasDem untuk mengukur kebutuhan anggaran dan keberhasilan pembangunan.*

diatas Nasional 9,8 persen. Oleh karena itu, Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) 2020, harus fokus pada pengentasan kemiskinan, karena Demak yang berada pada posisi 11 kabupaten se-Jateng masuk zona merah. Indikasi kemiskinan juga dapat terlihat dari fluktuasi grafik inflasi. Di samping angka harapan hidup, hingga tingkat pengangguran terbuka. Terkait angka pengangguran terbuka, walaupun grafiknya sempat turun dari 2014 (11,84 persen) hingga 2017 (4,47 persen), namun kembali naik drastis pada 2018 menjadi 7,16 persen. Sebagai evaluasi, hal itu terjadi seiring naiknya UMR sementara di sisi lain tidak diimbangi kemampuan perusahaan. (Data Tribun Jateng, 2019). Sayangnya, prioritas KUA/PPAS tidak memasukkan agenda kebijakan pengentasan kemiskinan. Adanya ketidaksinkronan antara prioritas Musrenbangda dengan KUA/PPAS 2020.

3. Terkait optimalisasi kinerja pembangunan daerah kami mencatat hal-hal berikut:
 - a. Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk memerangi kemiskinan, namun mestinya membuat pertumbuhan tersebut berpihak kepada orang miskin, ***diperlukan pemerataan pembangunan infrastruktur tiap wilayah dan program kegiatan lain agar terjadi pemerataan pertumbuhan.*** Seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat, merupakan hal yang lebih penting lagi, dimana potret menggambarkan tingkat pengangguran Kabupaten Demak cenderung naik.
 - b. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi pro-rakyat dibutuhkan suatu kebijakan belanja APBD yang efektif dan efisien di dalam mekanisme alokasi dan distribusi yang berkeadilan khususnya untuk masyarakat akar rumput.
 - c. Disamping APBD, instrumen kebijakan pro rakyat non-APBD bisa melalui perbaikan iklim investasi, kerjasama Perbankan, Institusi Pembiayaan Swasta dan BUMD perlu untuk diefektifkan.
 - d. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sejak 2014-2018 cenderung mengalami penurunan signifikan. Padahal sektor ini pernah menjadi primadona pada tahun 2015 dan cukup banyak menyerap tenaga kerja khususnya masyarakat akar rumput. Perlu ada upaya serius pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor ini.
4. Dalam dokumen KUA, belum dipaparkan data terkait urusan wajib bidang pendidikan yang *up to date*. Banyak persoalan strategis bidang pendidikan seperti Rata-rata lama sekolah, Angka putus sekolah, rendahnya partisipasi PAUD yang belum dapat diukur progress perkembangannya. Alokasi anggaran memang harus disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan namun juga perlu menjawab persoalan-persoalan strategis dengan menelusuri penyebab langsung maupun tidak langsung, sehingga alokasi anggaran dapat menjawab permasalahan yang ada.
5. Data pencapaian penurunan Angka kematian Ibu, bayi dan balita, angka gizi buruk, usia harapan hidup, tidak terdapat dalam KUA. Sehingga agak menyulitkan mengukur antara persoalan di lapangan dan kebutuhan alokasi anggarannya. Fraksi Partai NasDem merekomendasikan agar ada perbaikan pelayanan kesehatan, perlu tambahan anggaran untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar data Basis Data Terpadu, Fasilitasi korban kekerasan berbasis gender.

7. Dalam rangka berkontribusi untuk menurunkan angka kemiskinan, Fraksi Nasdem mengusulkan agar Pemda berkonsentrasi untuk melakukan pemberdayaan perempuan yang terintegrasi mulai dari pelatihan produksi, pengemasan sampai pada fasilitasi pemasaran serta berorientasi pada penciptaan produk oleh-oleh khas kabupaten Demak dan revitalisasi pusat oleh-oleh sehingga terhubung dan terkoneksi dengan produk-produk UMKM yang ada di Demak, dan perlu disediakan gedung tempat produk-produk umkm sebagai pusat oleh-oleh.
8. Jumlah pendapatan daerah kabupaten Demak didapat dari Dana Perimbangan yang mencapai Rp. 997.492.058.000,- (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*) atau 52,48% dari jumlah pendapatan. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 21,24% atau sekitar Rp. 403.848.956.000,- (*Empat Ratus Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*), lain-lain pendapatan yang sah hanya menyumbang 26,26% dari total pendapatan atau sekita Rp.499.211.489.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Empat Ratus elapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) Besarnya anggaran yang diperoleh dari Dana Alokasi Umum serta dana penyesuaian dan otonomi khusus yang notabene dari pemerintah pusat dalam menyumbang pendapatan daerah Kabupaten Demak pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pendapatan anggaran pemerintah Kabupaten Demak masih sangat tergantung dari anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
9. Total belanja pegawai Rp. 835.828.545.454,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*) atau 42,15 % dari total belanja daerah. Sementara belanja modal hanya sebesar 9,27 % dari total belanja. Padahal belanja modal merupakan belanja yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Fraksi Nasdem merekomendasikan agar belanja modal dapat dinaikkan untuk mempercepat pembangunan daerah.
10. Melonjaknya anggaran bansos yang secara signifikan bahkan spektakuler dari 2019 sebesar Rp.11.834.800.000,- (*Sebelas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) menjadi Rp. 31.279.800.000,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) pada 2020 atau naik sekitar 264,30 % dari tahun sebelumnya harus diseleksi dan diawasi secara cermat karena menjelang pelaksanaan pilkada tahun 2020, karena dikhawatirkan digunakan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik. Padahal masih banyak persoalan strategis yang belum mendapatkan alokasi anggaran yang cukup misalnya, dalam isu pertanian, perikanan, kelautan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat perempuan. Lain halnya dengan belanja hibah tahun 2019 sebesar Rp.60.408.506.000,- (*Enam Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah*) menjadi Rp. 45.608.199.000,- (*Empat Puluh Lima Milyar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) pada tahun 2020 atau turun sebesar 24,51%.

pendapatan dan belanja perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 2.281.756.169.052,- (Dua Triliun Dua ratus Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Dua Rupiah) ada penurunan sekitar 16,71 %. Kenapa bisa terjadi demikian, mohon penjelasan?

12. Didalam pos pendapatan terutama dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak sebesar Rp.37.080.664.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dan dana alokasi umum sebesar Rp.960.411.394.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) namun didalam pos Dana alokasi khusus 0 (Kosong), kenapa bisa demikian, mohon penjelasannya.
13. Didalam pos Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2020 muncul angka sebesar Rp.98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah) . Angka tersebut sumbernya dari mana?, karena pos penerimaan pembiayaan itu biasanya bersumber dari SILPA tahun anggaran yang lalu, padahal dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 tidak ada SILPA, mohon penjelasannya.
14. Salah satu lima prioritas pembangunan nasional tahun anggaran 2020 adalah infrastruktur dan pemerataan wilayah, dalam penganggaran APBD TA 2020 pembangunan infrastruktur di tiap kecamatan harus mencerminkan unsur pemerataan,namun kalau melihat APBD TA 2020 infrastruktur masih didominasi oleh kecamatan tertentu. kedepan diharapkan ada pemerataan kecamatan sesuai dengan Permendagri 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020.
15. Berkenaan PP 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dprd provinsi dan kabupaten/kota, maka kedepan perkiraan pembahasan KUA PPAS akan lebih alot dan dibutuhkan waktu lebih lama,hal ini disebabkan semua pimpinan dan anggota DPRD akan turut serta membahasnya,tidak hanya Banggar DPRD bersama tim APBD. Harapan Fraksi Partai NasDem perencanaan waktu minimal 2-3 minggu membahas KUA PPAS sehingga hasilnya lebih optimal.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa atas perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 6 tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dalam pengisian pengangkatannya sudah 2 (dua) kali ditahun 2017 dan sebagian ditahun 2019 selalu timbul masalah. Fraksi Partai Nasdem mendorong agar ada regulasi atau revisi perubahan perda tersebut agar dikemudian hari dalam pengisian pengangkatan perangkat desa tidak timbul masalah.
17. Sebentar lagi Musim Tanam tiba, untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk, hendaknya pemerintah daerah sungguh-sungguh melakukan langkah-langkah terhadap pengadaan dan pendistribusian pupuk. perlunya penyaluran pupuk secara adil kepada wilayah pertanian dengan stok pupuk ditingkat pengecer didesa disesuaikan dengan kebutuhan wilayah setempat. Demikian pula pemerintah daerah dan penegak hukum melakukan tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku terhadap penggarangan penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

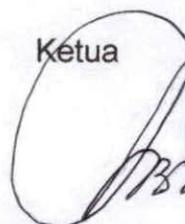
Demikian Pandangan umum Fraksi Partai NasDem terhadap RAI BD Kabupaten Demak TA 2020 disampaikan. Kiranya Pandangan, saran, masukan dan pendapat Fraksi Partai NasDem bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih, dalam upaya membangun, memajukan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Demak.

Dan pendapat, saran dan masukan fraksi partai nasdem juga disampaikan ke pimpinan Dewan agar pengambilan keputusan menjunjung tinggi azas kebersamaan, azas proporsional dan azas profesional bukan azas menang-menangan dan suka tidak suka.

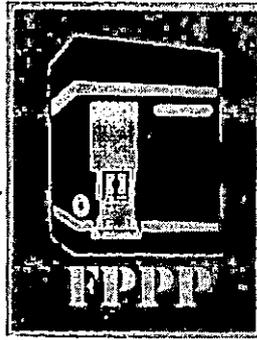
Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb.

**FRAKSI PARTAI NASDEM
(FPND)
DPRD KABUPATEN DEMAK**

Ketua  Sekretaris 

H. BUDHI ACHMADI, SE **IBRAHIM SUYUTI, SH**



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020

JUMAT, 15 NOVEMBER 2019

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020

Assalamualaikum wr. wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى إِمَامِ الْأَنْبِيَاءِ -
وَالْمُرْسَلِينَ , سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ
تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ , أَمَا بَعْدُ:-

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak

Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

Yth. Saudara Anggota Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri
Demak

Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan

Yth. Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Dinas, Instansi, Bagian dan para Camat se- Kabupaten Demak.

Segenap Undangan dan hadirin yang kami hormati.

Dalam kesempatan yang baik ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan rohmat, taufiq dan hidayah Nya, sehingga pada hari ini, Jumat, 15 November 2019 kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020

Sholawat dan Salam, senantiasa kita sampaikan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Rosul yang mulia, yang menyampaikan kebenaran, menuju keselamatan Umat manusia di dunia dan diakhirah. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya, Aamiin.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ketua Dewan selaku Pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami,

guna menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

Sebelum memasuki materi pokok, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak menyampaikan Ucapan :

1. Selamat kepada umat Islam yang telah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan Syafa'atnya dan dapat meniru ahlak Beliau di dalam mengemban amanat dan berma syarakat.
2. Selamat hari Pahlawan yaitu tanggal 10 November kemarin, tanggung jawab kita bersama ikut meneruskan perjuangannya dan berterima kasih terhadap jasa-jasanya .

Hadirin Rapat Dewan yang Kami hormati,

Setelah di sepakatinya Kebijakan Umum Anggaran Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, dengan mendasarkan

Ketentuan Undang –Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan perubahannya Undang – Undang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah di ubah terahir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2020 mendasarkan Permendagri N0.33 Tahun 2019. maka sampailah tahapan penyerahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk di bahas bersama antara Eksekutif dan Legislatif sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing – masing dalam rangka menjalankan amanat sesuai dengan ketentuan aturan perundang –undangan yang berlaku.

RAPBD Kabupaten Demak Th. 2020 adalah memasuki tahapan RPJMD Kabupaten Demak yang memasuki tahap-tahap ahir ,maka hal ini butuh keseriusan pemerintah daerah karena visi dan Misi Sdr. Bupati Demak yang tertuang dalam RPJMD sudah bisa di lihat berhasil atau tidaknya, maka butuh kecermatan terhadap mana saja

program yang harus di atasi atau di maksimalkan guna kemajuan Kabupaten Demak untuk kesejahteraan Masyarakat.

Hadirin Rapat Dewan yang kami hormati,

Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak menyampaikan beberapa pendapat, saran, masukan serta pertanyaan terhadap RAPBD Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Rencana Pendapatan Daerah dalam RAPBD Tahun 2020 di target sebesar Rp.1.900.552.503.000 , Adapun Belanja Daerah di rencanakan sebesar Rp.1.982.552.503.000 , hal ini mengalami penurunan di banding APBD Tahun 2019 setelah perubahan, dengan Pendapatan sebesar 2.281.756.169.052 , dan Belanja sebesar Rp. 2.429 .594.395.343 .

Terhadap hal tersebut Mohon penjelasan ?

2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan program pembuatan KTP masih belum bisa lancar dengan alasan kendala yang berulang – ulang setiap tahunnya ,kami berharap agar pada tahun 2020 nanti semua bisa teratasi dengan baik

dengan upaya dari pemerintah secara maksimal bagaimana langkah –langkah yang di upayakan , Mohon penjelasan ?

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan aturan perundang – undangan yang berlaku,di antaranya adalah melaksanakan penegakan Perda – Perda yang ada untuk Kabupaten Demak ,dalam hal ini antara lain Penegakan Perda tentang karaoke masih ada permasalahan yang harus segera di tindak lanjuti oleh Satpol PP dan berkoordinasi dengan Pihak terkait terhadap penertiban tersebut sehingga bisa tuntas. Mohon penjelasan

4. Program Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar :Rp.427.395.477.000,- antara lain di gunakan untuk ADD sebesar Rp. 98.000.000.000,- , untuk DD sebesar Rp.287.089.488.000,- dan lainnya, dalam realisasinya mohon penjelasan aturan pembagian dana perdesa dan kriterianya serta tahapan pelaksanaanya , sehingga bisa efektififitas . begitu juga Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Sebesar Rp.39.990.000.000,- untuk pembahasan RAPBD dalam Rapat Badan Anggaran atau

Komisi agar di sajikan lampiran penjabarannya dan di berikan kepada DPRD .

5. Terkait dengan upaya peningkatan PAD Kabupaten Demak maka Fraksi PPP DPRD Demak berpendapat perlunya melakukan terobosan- terobosan yang bersifat kreatif dan dinamis untuk menciptakan potensi retribusi baru yang bersumber dari kegiatan usaha di tengah –tengah masyarakat yang bersifat perseorangan maupun waralaba, bagaimana tanggapan Pemerintah Daerah kaitannya hal ini , Mohon penjelasan ?
6. Agar Dinas Perkim membuat Program pembangunan jalan poros penghubung antar Desa lebih maksimal lagi karena masih banyak jalan yang belum bagus bahkan becek, hal ini dapat di koordinasikan lebih detail di tiap kecamatan jangan sampai ada kesan pembiaran , Mohon penjelasan.
7. Terkait jebolnya Bendungan Karet di Desa Dero Kecamatan Wedung Fraksi PPP meminta kepada pemerintah agar segera mengatasi hal tersebut karena ada dampak juga kaitan kebutuhan air dan air bersih pada masyarakat. Begitu juga agar memaksimalkan normalisasi Sungai yang sudah sedimintasi atau

dangkal guna kelancaran dan antisipasi banjir di kabupaten Demak, Mohon penjelasan ?

8. Terkait Pengelolaan sampah untuk tempat pembuangan akhir akan di pindahkan di Desa berahan wetan dengan area seluas 25 Hektar, baru terselesaika pembelian tanah 16 Hektar begitu juga untuk akses jalan menuju lokasi dan pembangunan sarana dan prasarananya , alat transportasinya harus memadahi sehingga demak tidak ada permasalahan sampah, terhadap hal ini Kami mendorong agar Program tersebut pada Tahun 2020 bisa terselesaikan Mohon Penjelasan?

9. Untuk kenyamanan dalam pelayanan kesehatan maka perlunya koordinasi antar tingkatan pada pusat pelayanan kesehatan dengan baik dan adanya sinergitas. Dan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sangat tidak mampu yang tidak tercover di jamkesda dan atau BPJS agar di utamakan dan ada kemudahan dalm pengurusannya. Juga perlunya sosialisasi yang baik mengenai penghapusan BPJS sehingga masyarakat tahu permasalahan tersebut. Mohon penjelasan ?

10. Fraksi PPP menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Demak

Agar segera menetapkan Raperda Pendidikan di kabupaten Demak,
Sebagai mana hasil audiensi Pimpinan DPRD, Ketua Komisi D,
Bapemperda dan PGSI Kabupaten Demak sepakat di tetapkan .

Hadirin Rapat Dewan yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
terhadap Rancangan APBD Kabupaten Demak Tahun 2020, Kemudian
untuk di tindak lanjuti dalam tahapan Rapat berikutnya. kemudian
apabila ada kehilafan dan kesalahan mohon ma'af yang sebesar-
besarnya, atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami sampaikan
terima kasih, semoga Demak semakin maju, aman, kondusif, bersih dan
tertib dibawah lindungan Allah SWT, Aamiin.

Walloohul muwaafiq ilaa aqwamith thoriiq

Wassalamualaikum wr. wb.

Demak, 15 November 2020

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN DEMAK**

KETUA

SEKRETARIS



H.ABUSAID S.Pd.I

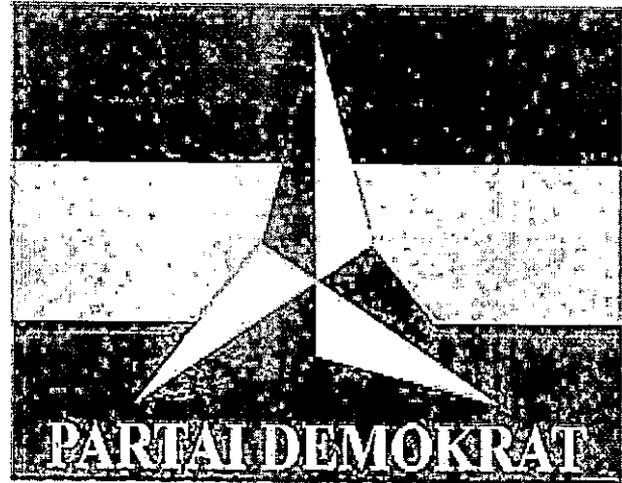
BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos

FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

ATAS

RAPERDA APBD KABUPATEN DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2020



DEMAK, 15 NOVEMBER 2019

- Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak
- Yang kami hormati Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak
- Yang kami hormati FORKOMPINDA, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Demak atau yang mewakili.
- Yang kami hormati Sekda dan Sekwan Kabupaten Demak
- Yang kami hormati Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda Kabupaten Demak
- Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, dan Instansi sekabupaten Demak
- Yang kami hormati Camat sekabupaten Demak
- Yang kami hormati Tamu undangan dan teman-teman mass media baik cetak maupun elektronika di Kab. Demak

-
- Mengawali pandangan umum ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan penguasa alam semesta dimana sampai saat ini kita masih menerima Taufik dan Hidayah-NYA sehingga kita masih dapat menghadiri Rapat Paripurna Siang ini.
 - Sholatullah wa salamullah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang Insya Allah dengan Ridha Allah besok akan memberi syafaat kepada kita semua, Amin.

Anggaran 2020, ijinkan kami menyampaikan ucapan

- Selamat memperingati Hari kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW, dengan Maulid Nabi Muhammad SAW mari kita teladani Akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

- Tak lupa Kami dari Fraksi Amanat Demokrasi mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2019. Dengan semangat para Pahlawan diharapkan setiap insan masyarakat Indonesia memiliki semangat kepahlawanan dan tergerak hatinya untuk berjuang membangun negeri sesuai kemampuan dan profesi masing-masing hal tersebut dapat menjadi salah satu modal untuk membangun bangsa. dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

- Selamat Hari Kesehatan Nasional, 12 November 2019. Mari jadikan Hari Kesehatan Nasional sebagai momentum untuk menyadari betapa pentingnya kesehatan dalam kehidupan kita

- Selanjutnya kami ucapkan Terimakasih kepada Pimpinan Rapat yang sudah memberi waktu kepada Fraksi Amanat Demokrasi untuk menyampaikan Pandangan Umum, atas **RAPERDA APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020**

berbahagia....

Membaca KUA PPAS Tahun Anggaran 2020, kami melihat ada keragu-raguan dari Pemerintah Daerah terkait proyeksi pendapatan Daerah tahun 2020. Khususnya dari Dana Alokasi Khusus, dimana pada KUA PPAS disebutkan asumsi Pendapatan dari sektor DAK, akan tetapi pada tahapan proses selanjutnya, yaitu pada RAPBD Dana Perimbangan dari Dana Alokasi Khusus tidak dicantumkan, begitu juga pada Dana Alokasi Umum Pemda mengasumsikan Pendapatan yang sama pada tahun kemarin. Hal ini menurut kami menunjukkan bahwa kinerja Organisasi Perangkat Daerah belum maksimal dalam rangka peningkatan APBD yang semua itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu kami dari Fraksi Amanat Demokrasi ingin menyampaikan beberapa saran dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Perusahaan Daerah agar melakukan Diversifikasi usaha
2. Pada Bulan Oktober Bendung Karet Kalijajar yang berlokasi di Ndero Kecamatan Bonang mengalami kerusakan, sampai dengan pembacaan Pandangan Umum ini menurut petugas penjaga bendungan belum ada penanganan untuk perbaikan
Pertanyaannya adalah sampai kapan bendung itu dapat berfungsi kembali?

diproyeksikan Rp. 555.169.861.540 (lima ratus lima puluh lima milyar seratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah) akan tetapi pada RAPBD DAK Untuk tahun 2020 tidak dicantumkan. Hal ini berpengaruh pada Proyeksi Pendapatan APBD tahun 2020.

Mengapa demikian?

Sedangkan di RS Kalijaga sudah direncanakan belanja yang sesuai dengan KUA 1 atau KUA Sementara tetap tercantum di RAPBD walaupun tertulis defisit

4. Pada tahun 2019 ini petani garam mengeluh terkait harga garam yang sangat murah.

Pertanyaannya adalah apa yang sudah dilakukan Pemerintah daerah dalam membantu tata Niaga Garam Rakyat

5. Bila Pemerintah Pusat jadi menaikkan premi BPJS kelas III dari Rp. 25.500 menjadi Rp. 42.000, sedangkan Pemkab harus membayar UHC sebanyak 47.526 jiwa, sedangkan anggaran di RAPBD tahun 2020 hanya sebesar Rp. 13.117.064.000. untuk menutup kekurangannya diambil dana dari mana?

6. Dari sekian banyak restoran dan rumah makan yang ada di Kabupaten Demak hanya mendapatkan pajak Rp. 650.000.000, menurut hemat kami dapat ditingkatkan dengan

7. Memperhatikan Penataan di sekitar Tugu Selamat Datang kota Demak di Desa Sriwulan Sayung agar tidak kelihatan kumuh, kami berharap Pemerintah Kabupaten Demak untuk segera melakukan penataan kembali agar Pintu masuk ke kota Demak bisa kelihatan lebih rapi dan indah.

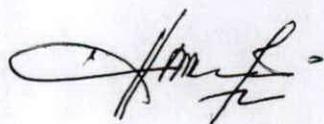
Demikian Pandangan Umum dari Fraksi Amanat Demokrasi atas Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Demak, 15 November 2019

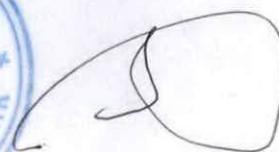
Ketua



H. Farodli. S.Pd.I



Sekretaris



Fatkhan. SH



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)
DPRD KABUPATEN DEMAK**

TERHADAP:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG:

**“ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020”**

Oleh:

DANANG SAPUTRO, S.H.

**Disampaikan dalam Sidang Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak
Jumat, 15 November 2019**

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**TERHADAP:
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG:
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020**

**Disampaikan dalam Sidang Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Demak, Jumat 15 November 2019**

**Oleh :
Danang Saputro, S.H.**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Indonesia Raya!

1. Yang saya hormati Saudara Bupati Kabupaten Demak;
2. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kabupaten Demak;
3. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak;
4. Yang saya hormati FORKOMPINDA Kabupaten Demak;
5. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
6. Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
7. Yang saya hormati Kepala Dinas, Badan, Bagian, Bidang, dan Seluruh Camat;
8. Yang saya hormati Rekan - Rekan Wartawan dan Hadirin sekalian.

segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda **“Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020”**.

Selanjutnya, sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada jujungan kita beliau Nabi Muhammad SAW, yang senantiyasa kita nantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Saudara Bupati, Pimpinan, Anggota Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan Pemandangan Umum kami.

Sebelum kami menyampaikan Pemandangan Umum kami, izinkan kami Fraksi Partai Gerindra mengucapkan: **“Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita senantiyasa diberikan hidayah untuk meneladani sifat dan perilaku Rosululloh setiap saat”**. Kami juga mengucapkan, **“Selamat hari Pahlawan, dengan memperingati hari pahlawan diharapkan kita mampu meningkatkan rasa cinta kepada tanah air”**.

berbahagia.

Setelah melakukan rapat Fraksi Partai Gerindra selama tiga hari, kami menyimpulkan pandangan umum kami, yaitu sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Pemerintah Pusat (BKPP) dalam menjalankan seleksi CPNS agar profesional dan terbuka sesuai ketentuan yang berlaku, dan kami berharap Saudara Bupati untuk segera memproses pengangkatan honorer K2 yang sudah lolos seleksi, sebelum proses pelaksanaan CPNS 2019 dilaksanakan.
2. Sejauh mana SATPOL PP melakukan tindakan kongrit terhadap penegakan Perda yang telah ditetapkan bersama DPRD dan Bupati Kabupaten Demak?
3. Terkait dengan pengambil alihan BKK Dempet menjadi BKK Jawa Tengah mengakibatkan Pemda Kabupaten Demak tidak menerima Deviden (bagi hasil) 2020 – 2021. Apa langkah Saudara Bupati untuk menyikapi hal tersebut?
4. Terkait dengan kejadian kekurangan bahan baku sebagaimana yang dikeluhkan oleh direktur PDAM dan dampak dari sobeknya bendung karet, maka langkah antisipasi apa yang dilakukan Saudara Bupati ke depan agar dalam tanda kutip Tragedi tidak terulang?
5. Terkait persoalan pasar yang sangat rumit, mulai dari parkir, retribusi, kebersihan, dan sejenisnya, langkah konkrit apa yang saudara Bupati akan lakukan pada tahun 2020 dan pada masa yang akan datang?

lebih mendapatkan peningkatan Deviden dibanding tahun - tahun sebelumnya, bahwa dalam pandangan kami angka tersebut bisa mencapai angka **dua puluh empat milyar**. Bagaimana saudara Bupati menyikapinya?

7. Terkait dengan sampah organik dan non organik, kami berpendapat bahwa hal tersebut dapat diolah menjadi pupuk dan berguna bagi masyarakat. Bagaimana Saudara Bupati mewujudkan hal tersebut?
8. Apakah program **PUSKESMAS BLUD** bisa dilaksanakan dengan baik? Mengingat pendapatan di tiap – tiap puskesmas sangat kecil, selama ini masih ditopang APBD yang cukup besar.
9. Dinas Kesehatan segera menemukan data anggota BPJS PBI yang dibekukan oleh pusat sebesar tiga puluh empat ribu jiwa se-Kabupaten Demak, karena menyangkut keterpeliharaan kesehatan masyarakat.
10. Anggaran menu untuk penanganan Stanting sebesar Rp 8000 (delapan ribu rupiah) per-hari untuk satu pasien agar ditingkatkan anggarannya sekurang – kurangnya Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), karena hal tersebut menyangkut **Lose Generation** yang akan datang.
11. Terhadap buku RAPBD dan buku penetapan APBD, untuk mencantumkan program sehingga dapat jelas dibaca dan diketahui oleh masyarakat, termasuk lampiran – lampirannya.

berbahagia.

Setelah kami memaparkan serangkaian Pemandangan Umum, kami juga memberikan beberapa saran dan usulan, yaitu:

1. Melakukan perbaikan kantor – kantor kecamatan yang sudah tidak layak.
2. Sesuai visi dan misi Bupati Kabupaten Demak terkait dengan bidang keolahragaan, kami mengusulkan untuk memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana olahraga secara kongkrit, yaitu segera membangun **Sport Centre** yang memadai.

berbahagia.

Demikian, Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Demak, semoga masukan dan kritikan yang konstruktif yang telah disampaikan bermanfaat untuk membangun Kabupaten Demak yang lebih baik, semoga Allah Swt. selalu menyertai langkah kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan.

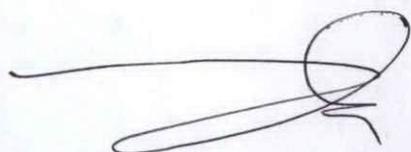
Salam Indonesia Raya!

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Demak, 15 November 2019

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Ketua,



Danang Saputro, S.H.



Sekretaris,



H. Mu'thi Kholil, S.H.

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020**



**SIDANG PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
JUM'AT, 15 NOPEMBER 2019**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020**

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua

- Yang Kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak:
- Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua DPRD dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang Kami Hormati Jajaran FORKOPIMDA Kabupaten Demak.
- Yang kami hormati Saudara Sekda, beserta jajarannya;
- Yang Kami Hormati Sekretaris Dewan Kab. Demak.
- Yang kami hormati Rekan-Rekan Wartawan, dan Hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah robbil' alamin segala puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kab Demak pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat,
Sholawat serta salam semoga selalu tercurah Kepada Nabi agung Muhammad SAW.

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Pimpinan Sidang, yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi Partai

Kebangkitan Bangsa (FPKB), untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD KAB DEMAK Tahun Anggaran 2020, dalam forum yang terhormat ini.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah dalam menjalankan fungsinya baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemda Kab Demak yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya penyusunan APBD pada substansinya adalah untuk melakukan penyesuaian kondisi-kondisi terkini yang ada di tengah masyarakat secara makro maupun mikro, sehingga dengan APBD penggunaan secara tepat dapat memberikan manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya menanggapi penyampaian Penghantar Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh Bupati Kab Demak, maka izinkan kami Fraksi PKB, memberikan pandangan umumnya terkait beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara RAPBD kabupaten Demak tahun anggaran 2020 sebesar **Rp 1.900.552.503.000**
(*satu triliun sembilan ratus milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga ribu rupiah*) pendapatan asli daerah sebesar **RP.403.848.956.000.-**

(empat ratus tiga milyar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) sedangkan dana perimbangan adalah sebesar Rp.997.492.058.000.-(*sembilan ratus sembilan puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta lima puluh delapan ribu rupiah*)sedangkan dana lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar RP.499.211.489.000 (*empat ratus sembilan puluh sembilan milyar dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*) kalau kita lihat dengan cermat adalah , bahwa kontribusi berdasarkan proyeksi yang di sampaikan bupati kabupaten Demak terlihat ada kenaikan PAD sekitar 21.25 % sedangkan secara keseluruhan dana perimbangan memberikan kontribusi sebesar 52 % sedangkan pendapatan lain yang sah memberikan kontribusi sebesar 26%

Dengan adanya selisih tersebut tentunya didukung oleh berbagai argumentasi, namun yang terpenting adalah dalam RAPBD ini, ada dua hal pokok yaitu Pendapatan dan Belanja. Prinsip dasar arus Pendapatan adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas, sehingga pendapatan daerah terkumpul sebanyak-banyaknya. Sementara prinsip dasar arus Belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Kab Demak yang lebih berkeadilan.

2. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah, dalam kerangka ekonomi makro, diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah, yang lebih memberikan effect multiplier, bagi peningkatan kesejahteraan Rakyat yang lebih merata. Dengan kenaikan

PAD tersebut tentunya dalam belanja juga diperhatikan Efektivitas anggaran mengingat tahun 2020 Kabupaten Demak akan melaksanakan Pilkada tentunya akan menelan anggaran yang cukup besar oleh karena itu Dalam rangka melakukan efektivitas anggaran, apabila dana tidak terserap dikarenakan kegiatan tidak terlaksana, Selanjutnya Fraksi PKB meminta agar penyerapan anggaran diharapkan bukan hanya sekedar terserap saja namun juga diharapkan penyerapan memberikan efek positif dalam rangka meningkatkan Pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat.

3. Secara keseluruhan, pendapatan asli daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020 ada kenaikan 7% tetapi berdasarkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Demak sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 kurun waktu 5 tahun pertumbuhan ekonomi kab Demak tertinggi 5,82 % pada tahun 2017 sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 5,37%. Oleh karena itu FRAKSI PKB menekankan kepada bupati serta Jajaran untuk meningkatkan kinerja dan harus mencari terobosan agar kenaikan PAD 7% dapat terealisasi dan tidak membebani pada masyarakat, jika bupati serta jajaran tidak memiliki opsi lain maka dipastikan 7% kenaikan hanya isapan jempol saja. Tuntutan kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 7 % harus mampu di wujudkan karena jika semua ini bisa terealisasi maka secara langsung maupun tidak pertumbuhan ekonomi kabupaten Demak akan terdorong sehingga tingkat Kemiskinan dengan sendirinya akan semakin berkurang namun sebaliknya jika pemerintah tidak bisa mewujudkan maka kemiskinan di kabupaten Demak akan semakin meningkat .
4. Untuk Pendapatan Asli Daerah, Fraksi PKB Mengapresiasi, tetapi di sisi lain

,menyoroti kinerja seluruh jajaran eksekutif Pemerintah Kab Demak, khususnya terkait dengan aspek pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat jauh dari harapan karena sesungguhnya potensi untuk menaikkan pendapatan asli daerah masih cukup besar. Sehubungan hal tersebut, Fraksi PKB berharap bahwa OPD yang terkait dengan pendapatan, agar terus menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi), berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik, dan benar, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Perubahan Kebijakan Pendapatan, tentunya berdasarkan kondisi terkini kinerja perekonomian Daerah maupun Nasional, serta memperhatikan perhitungan RAPBD Kab. Demak Tahun Anggaran 2020 khususnya evaluasi kinerja bidang pendapatan, maka kebijakan Pendapatan Daerah pada RAPBD TA 2020 Kab Demak harus mempertimbangkan berbagai hal seperti Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan semester satu tahun 2020, hasil kinerja dari pengelolaan Badan layanan Umum daerah BLUD maupun BUMD, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, juga menjadi bahan pertimbangan. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya apa yang bisa dilakukan pemerintah Kabupaten Demak agar target pendapatan daerah dapat terpenuhi. (wajib di realisasi)
6. Selanjutnya Fraksi PKB memandang bahwa penyampaian tentang Rancangan APBD TA 2020 adalah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pengelola keuangan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, juga sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakan akuntabilitas Publik dalam

semua tahapannya. Oleh karena itu prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi Masyarakat.

7. Untuk mewujudkan visi Kab Demak haruslah di dukung dengan daya saing yang kuat . Oleh karena itu, daya saing menjadi persoalan yang harus kita hadapi dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih siap. Dalam Anggaran RAPBD Tahun Anggaran 2020 ini sangat penting kiranya mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan Ekonomi masyarakat, pembangunan sarana umum yang berbasis teknologi ,Sarana olahraga ,Gedung seni dan budaya, serta pariwisata dan tidak ketinggalan adalah perlunya meningkatkan SDM dan kesejahteraan para Guru Madrasah Diniyah , Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelatihan ketrampilan ekonomi lainnya, pengembangan produk lokal berbasis daerah agar dapat dilaksanakan hingga akhir tahun 2020 mendatang, sehingga kita berharap muncul produk-produk lokal yang dapat dipasarkan ke luar daerah Kab Demak atau bahkan pasar luar negeri. Seberapa besar RAPBD tahun 2020 ini memperhatikan kegiatan dalam rangka meningkatkan daya saing.
8. FRAKSI PKB menyoroti lemahnya para pemangku kepentingan untuk melakukan koordinasi antar Instansi yang terkait dalam menjalankan regulasi yang tepat dan efisien belum mampu di wujudkan dengan baik, dan perlunya pemerintah mengevaluasi beberapa peraturan Bupati yang tidak berpihak kepada masyarakat ekonomi rendah antara lain toko modern menjamur sampai ke desa-desa dan juga ada yang buka 24 jam, inilah pokok pikiran kami agar pemerintah benar-benar mengedepankan Rakyat kecil jangan sampai pembiaran ini berlanjut sehingga tidak menciptakan kemiskinan baru.

pelayanan satu pintu yang di harapkan masyarakat tidak mampu di wujudkan dengan waktu yang efisien, oleh karena itu di mohon pemerintah di tahun 2020 bisa mengubah yang baik lagi agar harapan masyarakat mampu diwujudkan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat kabupaten Demak bisa lebih baik.

9. Pemerintah kabupaten Demak mulai tahun 2020, menuju Demak smart city, kami FRAKSI PKB memberikan apresiasi gagasan serta pemikiran tersebut, tetapi apa yang kita rasakan dan yang kita lihat sampai hari ini rasanya masih jauh dari harapan, oleh karena itu pembenahan layanan fasilitas umum untuk menuju smart city harus lebih di utamakan bukan sebaliknya justru pembangunan perkantoran yang menjadi utama.

10. Perda Pendidikan yang sudah pernah di bahas, tetapi belum ada kesepakatan dalam pengesahannya oleh karena itu, FPKB mendesak agar Perda tentang Pendidikan untuk segera di sahkan.

11. Kehadiran Undang-undang No.18 tahun 2019 tentang pesantren, menjadi konsekuensi logis pemerintah Daerah untuk menerbitkan Perda Pesantren. Untuk itu FPKB mengharapakan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keberpihakan anggaran Daerah terhadap sektor pendidikan Non Formal (Pesantren, MADIN, TPQ dan lembaga keagamaan lainnya).

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Sebelum menutup Pemandangan Umum ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap agar proses pembahasan RAPERDA RAPBD tahun 2020 ini betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD yang benar-benar memenuhi keinginan

masyarakat Kabupaten Demak.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang ABPD Tahun Anggaran 2020, ada kurang lebihnya dalam penyampaian Pemandangan Umum ini kami mohon maaf, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mohon ijin kami untuk menyampaikan pantun

“(Beban berat coba di angkat, Walau berkeringat di cuaca panas, Mari bersama sama berjuang melestarikan adat agar kita bisa mengayomi masyarakat)”

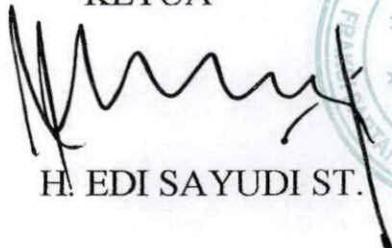
Wallahul muwaafiq ilaa aqwamittoriq.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Demak, 15 Nopember 2019

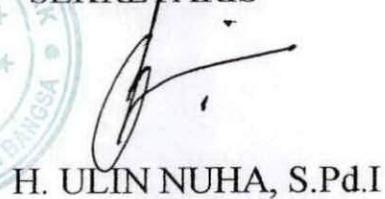
PIMPINAN PRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
KABUPATEN DEMAK

KETUA



H. EDI SAYUDI ST.

SEKRETARIS



H. ULIN NUHA, S.Pd.I

